

# 2025 RENCANA KERJA

BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN  
DAN ASET DAERAH KOTA BEKASI



PEMERINTAH KOTA BEKASI  
TAHUN 2024

PARAF KOORDINASI	
KEPALA BPKAD	
KEPALA BAPPELITBANGDA	
KABAG HUKUM	

## DAFTAR ISI

BAB I PENDAHULUAN .....	1
1.1. Latar Belakang .....	1
1.2. Landasan Hukum .....	3
1.3. Maksud Dan Tujuan .....	4
1.4. Sistematika Penulisan .....	5
BAB II EVALUASI PELAKSANAAN RENJA TAHUN 2022 -2023 BPKAD KOTA BEKASI .....	9
2.1. Evaluasi Pelaksanaan Renja BPKAD Tahun 2022 – 2023 dan Capaian Renstra Tahun 2022 – 2023 .....	9
2.2. Analisis Kinerja Pelayanan PD .....	39
2.3. Isu-Isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi BPKAD Kota Bekasi .....	45
2.4. Review Terhadap Rancangan Awal RKPD .....	52
2.5. Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat .....	77
BAB III TUJUAN DAN SASARAN .....	78
3.1. Telaahan Terhadap Kebijakan Nasional .....	78
3.2. Tujuan dan Sasaran Renja PD .....	80
BAB IV RENCANA KERJA DAN PENDANAAN BPKAD .....	102
4.1. Program dan Kegiatan .....	102
BAB VIII PENUTUP .....	116

PARAF KOORDINASI	
KEPALA BPKAD	
KEPALA BAPPELITBANGDA	
KABAG HUKUM	

Lampiran Gambar dan Tabel :

1.1.1 Tabel Keterkaitan Renja BPKAD Kota Bekasi dengan Renja BPKAD Provinsi Jabar .....	2
2.1.1. Tabel Realisasi Anggaran BPKAD Kota Bekasi TA. 2024.....	12
2.1.2. Tabel Rekapitulasi Evaluai Hasil Pelaksanaan Renja BPKAD dan Pencapaian Renstra BPKAD Tahun 2022 – 2023.....	28
2.2.1. Tabel Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja BPKAD Dan Pencapaian Renstra BPKAD s.d Tahun 2023 Triwulan II .....	40
2.3.1. Tabel Isu – Isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi BPKAD Kota Bekasi.....	46
2.4.1. Tabel Review terhadap Rancangan Awal RKPD 2024 Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah.....	53
2.5.1. Tabel Usulan Program dan Kegiatan dari Para Pemangku Kepentingan Tahun 2024 BPKAD Kota Bekasi .....	77
3.1.1. Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah .....	81
3.2.1. Program dan Kegiatan Perangkat Daerah Tahun 2024.....	83
4.2.1. Rencana Kerja dan Pendanaan Indikatif Program dan Kegiatan Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kota Bekasi .....	105

PARAF KOORDINASI	
KEPALA BPKAD	
KEPALA BAPPELITBANGDA	
KABAG HUKUM	

# BAB I

## PENDAHULUAN

### 1.1. Latar Belakang

Perencanaan merupakan suatu proses untuk menentukan tindakan masa depan yang tepat melalui urutan pilihan dengan memperhitungkan sumber daya yang tersedia, perencanaan juga merupakan suatu proses yang berkesinambungan yang mencakup keputusan-keputusan atau pilihan-pilihan alternatif penggunaan sumber daya untuk mencapai tujuan-tujuan tertentu pada masa yang akan datang. Untuk mencapai proses tersebut, maka keterkaitan suatu dokumen perencanaan dengan dokumen perencanaan lainnya sangat erat dan menentukan.

Sebagai tindak lanjut amanat Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional dan Peraturan Pemerintah (PP) RI Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah serta Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah maka Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kota Bekasi menyusun Rencana Kerja Satuan Kerja Perangkat Daerah (Renja SKPD). Renja SKPD merupakan dokumen perencanaan yang memuat program dan kegiatan dalam bentuk kerangka regulasi dan kerangka anggaran dalam rangka menjamin penyelenggaraan pemerintah yang demokratis, transparan, akuntabel, efisien dan efektif di bidang perencanaan pembangunan daerah.

Renja SKPD disusun dengan mengacu pada rancangan awal Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD), Rencana Strategis (Renstra) SKPD, hasil evaluasi pelaksanaan program dan kegiatan tahun sebelumnya, serta masalah yang dihadapi. Dalam menyusun Renja SKPD

PARAF KOORDINASI	
KEPALA BPKAD	
KEPALA BAPPELITBANGDA	
KABAG HUKUM	

perlu ditetapkan pula tujuan, sasaran, indikator kinerja, pagu indikatif, prakiraan maju, melakukan analisis serta penyesuaian program dan kegiatan sesuai skala prioritas daerah sebagai upaya pensinergian pencapaian sasaran dan target Renstra SKPD dan RPJMD tahun yang bersangkutan.

Rencana Kerja BPKAD harus selaras dengan Rencana Kerja kementerian/ Lembaga atau Instansi yang terkait dengan tugas dan Fungsi BPKAD Kota Bekasi, demi terwujudnya pengelolaan keuangan yang selaras antara pemerintah pusat dengan daerah. Dalam Menyusun dokumen Renja BPKAD Kota Bekasi memperhatikan Renja BPKAD Provinsi Jawa Barat.

**Tabel 1.1**  
**Keterkaitan Renja BPKAD Kota Bekasi dengan Renja BPKAD Provinsi Jawa Barat**

Tujuan BPKAD Provinsi Jabar	Sasaran BPKAD Provinsi Jabar	Indikator Tujuan/Sasaran BPKAD Provinsi Jabar	Tujuan BPKAD Kota Bekasi	Sasaran BPKAD Kota Bekasi	Indikator Tujuan/Sasaran BPKAD Kota Bekasi
Meningkatnya Kualitas dan Kapasitas Tata Kelola Pemerintahan Daerah		Indeks Reformasi Birokrasi	Mewujudkan Tata Kelola Keuangan dan Aset Daerah yang Profesional dan Akuntabel		Opini BPK terhadap Laporan Keuangan Daerah
	Terwujudnya pengelolaan keuangan dan barang milik daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang – undangan yang berlaku	Opini BPK terhadap Laporan Keuangan Pemerintah Daerah		Mencapai Kinerja terbaik dalam Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Setiap Tahun	Nilai Kinerja Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah

Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kota Bekasi mempunyai arti yang strategis dalam mendukung penyelenggaraan program pembangunan tahunan pemerintahan daerah, yaitu sebagai berikut :

PARAF KOORDINASI	
KEPALA BPKAD	
KEPALA BAPPSELITBANGDA	
KABAG HUKUM	

- 1) Rencana Kerja Organisasi Perangkat Daerah merupakan dokumen yang secara substansial penerjemahan dari visi, misi dan program Organisasi Perangkat Daerah yang ditetapkan dalam Renstra Organisasi Perangkat Daerah sesuai arahan operasional dalam Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD).
- 2) Rencana Kerja Organisasi Perangkat Daerah merupakan acuan Organisasi Perangkat Daerah untuk memasukkan program kegiatan kedalam KUA PPAS dan perencanaan program kegiatan yang akan dilaksanakan dalam RKA tahun 2025.
- 3) Rencana Kerja Organisasi Perangkat Daerah merupakan salah satu instrumen untuk evaluasi pelaksanaan program/ kegiatan Organisasi Perangkat Daerah untuk mengetahui sejauh mana capaian kinerja yang tercatat dalam RKT sebagai wujud dari kinerja SKPD pada tahun 2025.

## 1.2. Landasan Hukum

1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
2. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587);
3. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2008 Tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian Dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 86 Tahun 2017 Tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;

PARAF KOORDINASI	
KEPALA BPKAD	
KEPALA BAPPELITBANGDA	
KABAG HUKUM	

5. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 900.1.15.5-1317 Tahun 2023 Tentang Perubahan Atas Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 Tentang Hasil Verifikasi, Validasi, Dan Inventarisasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi Dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan & Keuangan Daerah;
6. Peraturan Daerah Kota Bekasi Nomor 4 Tahun 2007 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kota Bekasi Tahun 2007 Nomor 4 Seri A);
7. Peraturan Daerah Kota Bekasi Nomor 06 Tahun 2016 Tentang Urusan Pemerintahan Yang Menjadi Kewenangan Daerah Kota Bekasi;
8. Peraturan Daerah Kota Bekasi Nomor 07 Tahun 2016 Tentang Pembentukan Dan Susunan Perangkat Daerah Kota Bekasi;
9. Peraturan Wali Kota Bekasi Nomor 18 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Wali Kota Bekasi Nomor 65 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Pokok Dan Fungsi Serta Tata Kerja Pada Badan Pengelolaan Keuangan Dan Aset Daerah Kota Bekasi;
10. Peraturan Wali Kota Bekasi Nomor 09 Tahun 2023 tentang Rencana Pembangunan Daerah Kota Bekasi Tahun 2024 – 2026;
11. Peraturan Wali Kota Bekasi Nomor 12 Tahun 2025 tentang Rencana Kerja Perangkat Daerah Tahun 2025.

### 1.3. Maksud dan Tujuan

#### a. Maksud

Maksud disusunnya Rencana Kerja Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kota Bekasi Tahun Anggaran 2025, antara lain untuk :

- Meningkatkan konsistensi antara kebijakan dengan pelaksanaannya;
- Meningkatkan transparansi dan partisipasi dalam proses perumusan kebijakan dan perencanaan program;
- Menyelaraskan program dengan penganggaran;
- Meningkatkan akuntabilitas pemanfaatan sumber daya dan keuangan;
- Terwujudnya penilaian kinerja yang terukur dan perencanaan yang

PARAF KOORDINASI	
KEPALA BPKAD	
KEPALA BAPPSELITBANGDA	
KABAG HUKUM	

pelaksanaan sesuai dengan Renstra SKPD.

b. Tujuan

Tujuan penyusunan Rencana Kerja Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kota Bekasi adalah sebagai berikut :

PARAF KOORDINASI	
KEPALA BPKAD	
KEPALA BAPPELITBANGDA	
KABAG HUKUM	

- Menjabarkan Rencana Strategis kedalam program dan kegiatan untuk 1 (satu) tahun anggaran, yaitu tahun 2025;
- Menjadikan pedoman dalam pelaksanaan Program dan Kegiatan Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kota Bekasi Tahun Anggaran 2025 ;
- Sebagai upaya mewujudkan efisiensi dan efektifitas dalam perencanaan anggaran dan program kegiatan yang ada pada Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kota Bekasi Tahun Anggaran 2025.

#### 1.4 Sistematika Penulisan

##### Bab I Pendahuluan

Pada bagian ini dijelaskan mengenai gambaran umum penyusunan Renja BPKAD Kota Bekasi.

##### 1.1 Latar belakang

Mengemukakan pengertian ringkas tentang Renja BPKAD, proses penyusunan Renja BPKAD, keterkaitan antara Renja BPKAD dengan dokumen Renstra BPKAD Kota Bekasi

##### 1.2 Landasan Hukum

Memuat landasan hukum yang berkaitan dengan penyusunan Renja BPKAD Kota Bekasi Tahun 2025

##### 1.3 Maksud dan Tujuan

Memuat penjelasan tentang maksud dan tujuan dari penyusunan Renja BPKAD Kota Bekasi

##### 1.4 Sistematika Penulisan

Menguraikan pokok bahasan dalam penulisan Renja BPKAD Kota Bekasi, serta susunan garis besar isi dokumen

## BAB II. EVALUASI PELAKSANAAN RENJA BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH TAHUN LALU

### 2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja BPKAD Kota Bekasi Tahun lalu dan Capaian Renstra BPKAD

PARAF KOORDINASI	
KEPALA BPKAD	
KEPALA BAPPELITBANGDA	
KABAG HUKUM	

Bab ini memuat kajian (reviu) terhadap hasil evaluasi pelaksanaan Perangkat Daerah tahun lalu (tahun n-2) dan perkiraan capaian tahun berjalan (tahun n-1), mengacu pada APDB tahun berjalan yang seharusnya pada waktu penyusunan Renja Perangkat Daerah sudah disahkan.

## 2.2 Analisis Kinerja Pelayanan BPKAD Kota Bekasi

Berisikan kajian terhadap capaian kinerja pelayanan Perangkat Daerah berdasarkan indikator kinerja yang sudah ditentukan dalam NSPK dan SPM, maupun terhadap IKK sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2008.

## 2.3 Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi BPKAD Kota Bekasi

Berisikan mengenai sejauh mana tingkat kinerja pelayanan Perangkat Daerah dan hal kritis yang terkait dengan pelayanan Perangkat Daerah, permasalahan dan hambatan yang dihadapi dalam menyelenggarakan tugas dan fungsi Perangkat Daerah, dampaknya terhadap pencapaian visi dan misi kepala daerah, tantangan dan peluang dalam meningkatkan pelayanan Perangkat Daerah dan Formulasi isu-isu penting berupa rekomendasi dan catatan yang strategis untuk ditindaklanjuti dalam perumusan program dan kegiatan prioritas tahun yang direncanakan.

## 2.4 Reviu terhadap Rancangan Awal RKPD

Berisikan uraian mengenai proses yang dilakukan yaitu membandingkan antara rancangan awal RKPD dengan hasil analisis kebutuhan, penjelasan mengenai alasan proses tersebut dilakukan, penjelasan temuan-temuan setelah proses tersebut dan catatan penting terhadap perbedaan dengan rancangan awal RKPD.

## 2.5 Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat

PARAF KOORDINASI	
KEPALA BPKAD	
KEPALA BAPPSELITBANGDA	
KABAG HUKUM	

Dalam bagian ini diuraikan hasil kajian terhadap program/kegiatan yang diusulkan para pemangku kepentingan, baik dari kelompok masyarakat terkait langsung dengan pelayanan provinsi, LSM, asosiasi-asosiasi, perguruan tinggi maupun Perangkat Daerah Kabupaten/Kota yang langsung ditujukan kepada Perangkat Daerah Provinsi maupun berdasarkan hasil pengumpulan informasi Perangkat Daerah provinsi dari penelitian lapangan dan pengamatan pelaksanaan musyawarah perencanaan pembangunan (musrenbang) kabupaten/kota (bila sudah dilakukan).

### BAB III. TUJUAN, SASARAN BPKAD KOTA BEKASI

#### 3.1 Telaahan Terhadap Kebijakan Nasional

Telaahan terhadap kebijakan nasional dan sebagaimana dimaksud, yaitu penelaahan yang menyangkut arah kebijakan dan prioritas pembangunan nasional dan yang terkait dengan tugas pokok dan fungsi Perangkat Daerah.

#### 3.2 Tujuan dan Sasaran Renja BPKAD Kota Bekasi

Perumusan tujuan dan sasaran didasarkan atas rumusan isu-isu penting penyelenggaraan tugas dan fungsi Perangkat Daerah yang dikaitkan dengan sasaran target kinerja Renstra Perangkat Daerah.

#### 3.3 Program dan Kegiatan

Berisikan penjelasan mengenai faktor-faktor yang menjadi bahan pertimbangan terhadap rumusan program dan kegiatan dan uraian garis besar mengenai rekapitulasi program dan kegiatan.

### BAB IV. RENCANA KERJA DAN PENDANAAN BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH KOTA BEKASI

### BAB V. PENUTUP

PARAF KOORDINASI	
KEPALA BPKAD	
KEPALA BAPPELITBANGDA	
KABAG HUKUM	

Berisikan uraian penutup berupa catatan penting yang perlu mendapat perhatian, baik dalam rangka pelaksanaannya maupun kemungkinan ketersediaan anggaran tidak sesuai dengan kebutuhan.

PARAF KOORDINASI	
KEPALA BPKAD	
KEPALA BAPPELITBANGDA	
KABAG HUKUM	

**BAB II**  
**EVALUASI PELAKSANAAN RENJA TAHUN 2023 – 2024 BPKAD KOTA**  
**BEKASI**

2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja BPKAD Tahun 2023 – 2024 dan Capaian Renstra Tahun 2023 – 2024

Sebagaimana amanat Peraturan Pemerintah Nomor 8 tahun 2008 tentang Tahapan, tata cara penyusunan, pengendalian dan evaluasi pelaksanaan Rencana pembangunan Daerah, setiap dokumen perencanaan harus dievaluasi dalam pelaksanaannya. Oleh karena itu Rencana Kerja Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kota Bekasi tahun sebelumnya juga harus dievaluasi.

Berdasarkan Peraturan Daerah Kota Bekasi Nomor 7 Tahun 2016 Tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Pasal 2 huruf g telah ditetapkan Perangkat Daerah Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah dengan tipe A yang melaksanakan tugas pengelolaan keuangan dan aset daerah.

Berdasarkan tugas pokok dan fungsi tersebut, maka BPKAD melaksanakan pelayanan dibidang pengelolaan keuangan dan aset daerah meliputi pelayanan dalam rangka proses penganggaran daerah, pelayanan dalam rangka proses pencairan dana belanja langsung maupun belanja tidak langsung, pelayanan dalam pengelolaan barang milik daerah, serta pelayanan dalam penyusunan pelaporan keuangan daerah bagi seluruh perangkat daerah di Lingkungan Pemerintah Kota Bekasi

Evaluasi pelaksanaan rencana kerja tahun lalu dan pencapaian kinerja Renstra SKPD ditujukan untuk mengidentifikasi dan mengetahui sampai sejauhmana kemampuan SKPD dalam melaksanakan program dan kegiatan, mengidentifikasi realisasi pencapaian target kinerja program dan kegiatan Renstra SKPD, serta hambatan dan permasalahan yang dihadapi. Pencapaian target kinerja dinilai melalui suatu standar yang mampu menggambarkan tingkat

PARAF KOORDINASI	
KEPALA BPKAD	
KEPALA BAPPELITBANGDA	
KABAG HUKUM	

keberhasilan dari program dan kegiatan yang direncanakan, berupa indikator dengan target kinerja sebagai instrumen penilaian.

2.1.1. Evaluasi Capaian RENJA BPKAD Kota Bekasi Tahun 2022 – 2023

Sebagaimana kita telah ketahui bersama bahwa BPKAD selain OPD juga sebagai SKPKD, maka berdasarkan tabel tersebut di bawah ini dapat kita lihat bahwa BPKAD Kota Bekasi Tahun Anggaran 2023 sebagai OPD dan SKPKD tahun 2023 memiliki pagu Rp. 235.748.454.499,00 dengan realisasi Rp. 148.571.421.069,00 atau 63,02 %. Pagu BPKAD sebagai SKPKD Rp. 195.684.951.254,00 realisasi Rp. 111.150.688.466,00 prosentase 56,80 %. Sedangkan pagu BPKAD sebagai OPD Tahun Anggaran 2023 sebesar Rp. 40.063.503.245,00 dengan realisasi Rp. 37.420.732.603,00 atau 93,40 %.

BPKAD Kota Bekasi Tahun 2023 memiliki 3 Program, 10 Kegiatan dan 49 sub kegiatan yang mendukung pencapaian indikator sasaran Nilai Kinerja Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah, indikator sasaran Nilai Kinerja Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah yang dan mewujudkan penyelenggaraan pemerintahan yang akuntabel dengan Indikator Sasaran Nilai AKIP BPKAD

Adapun langkah – langkah yang dilakukan pada Tahun 2023 untuk mempertahankan capaian kinerja atas indikator kinerja utama Nilai Kinerja Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah adalah sebagai berikut :

- a. Transparansi Dalam Pengelolaan Keuangan Daerah;
- b. Peningkatan Kepatuhan Terhadap Aturan Perundang-Undangan;
- c. Meningkatkan Peran PPPK SKPD Untuk Meyakini Compliance;
- d. Mengoptimalkan Pelaksanaan Pembinaan, Sosialisasi, Bimbingan Secara Berkala Dan Berkelanjutan Tentang Tata Kelola Keuangan Dan Pelaporan Keuangan;
- e. Akselerasi Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan.

PARAF KOORDINASI	
KEPALA BPKAD	
KEPALA BAPPELITBANGDA	
KABAG HUKUM	

PARAF KOORDINASI	
KEPALA BPKAD	
KEPALA BAPPELITBANGDA	
KABAG HUKUM	

Tabel 2.1.1

## REALISASI ANGGARAN BPKAD KOTA BEKASI TA. 2023

URAIAN	PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	BPKAD SELAKU OPD			BPKAD SELAKU SKPKD			BPKAD SELAKU OPD DAN SKPKD		
		PAGU ANGGARAN (Rp)	REALISASI (Rp)	%	PAGU ANGGARAN (Rp)	REALISASI (Rp)	%	PAGU ANGGARAN (Rp)	REALISASI (Rp)	%
Mencapai kinerja terbaik dalam pengelolaan keuangan dan aset daerah setiap tahun	Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten/ Kota									
	Perencanaan, Panganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah									
	Koordinasi dan penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	15.000.000,00	12.068.500	80,46				15.000.000,00	12.068.500	80,46

PARAF KOORDINASI	
KEPALA BPKAD	
KEPALA BAPPSELITBANGDA	
KABAG HUKUM	

Administrasi Keuangan Perangkat Daerah										
<i>Penyediaan Gaji Tunjangan ASN</i>										
Belanja Gaji Pokok PNS	5.217.616.376,00	4.977.781.506	95,40	732.919.624	345.078.200	47,08	5.950.536.000,00	5.322.859.706	89,45	
Belanja Tunjangan Keluarga PNS	506.980.879,00	477.110.534	94,11	271.103.121	24.606.160	9,08	778.084.000,00	501.716.694	64,48	
Belanja Tunjangan Jabatan PNS	219.626.750,00	213.190.000	97,07	54.639.250	-	0,00	274.266.000,00	213.190.000	77,73	
Belanja Tunjangan Fungsional PNS	269.206.000,00	259.840.000	96,52	24.445.000	3.300.000	13,50	293.651.000,00	263.140.000	89,61	
Belanja Tunjangan Fungsional Umum PNS	153.042.750,00	139.675.000	91,27	145.952.250	19.060.000	13,06	298.995.000,00	158.735.000	53,09	
Belanja Tunjangan Beras PNS	311.768.100,00	291.200.820	93,40	150.925.900	18.394.680	12,19	462.694.000,00	309.595.500	66,91	
Belanja Tunjangan PPh/Tunjangan	3.858.787,00	6.362.777	164,89	20.113.213	-	0,00	23.972.000,00	6.362.777	26,54	

PARAF KOORDINASI	
KEPALA BPKAD	
KEPALA BAPPELITBANGDA	
KABAG HUKUM	

Khusus PNS									
Belanja Pembulatan Gaji PNS	73.946,00	67.592	91,41	211.054	8.881	4,21	285.000,00	76.473	26,83
Tambahan Penghasilan berdasarkan Beban Kerja PNS	7.081.503.000,00	6.905.107.155	97,51				7.081.503.000,00	6.905.107.155	97,51
Tambahan Penghasilan berdasarkan Kondisi Kerja PNS	6.074.822.000,00	5.905.189.589	97,21				6.074.822.000,00	5.905.189.589	97,21
Tambahan Penghasilan berdasarkan Prestasi Kerja PNS	3.637.595.000,00	3.562.014.267	97,92				3.637.595.000,00	3.562.014.267	97,92
Belanja Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan	324.350.000,00	322.579.995	99,45				324.350.000,00	322.579.995	99,45

PARAF KOORDINASI	
KEPALA BPKAD	
KEPALA BAPPELITBANGDA	
KABAG HUKUM	

	Belanja Jasa Pengelolaan BMD yang Tidak Menghasilkan Pendapatan	68.900.000,00	65.123.150	94,52				68.900.000,00	65.123.150	94,52
	Belanja Iuran Jaminan Kesehatan PNS	496.912.452	563.211.975	113,34	69.432.624.548	47.192.204.974	67,97	69.929.537.000,00	47.755.416.949	68,29
	Belanja Iuran Jaminan Kesehatan PPPK	-	-		5.203.997.000	4.548.288.831	87,40	5.203.997.000,00	4.548.288.831	87,40
	Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja PNS	14.907.373	10.321.954	69,24	17.637.835.627	953.735.310	5,41	17.652.743.000,00	964.057.264	5,46
	Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja PPPK	-	-		326.084.000	529.075.428		326.084.000,00	529.075.428	162,25

PARAF KOORDINASI	
KEPALA BPKAD	
KEPALA BAPPELITBANGDA	
KABAG HUKUM	

Belanja Iuran Jaminan Kematian PNS	44.722.120	30.777.607	68,82	4.932.771.880	2.861.394.181	4.977.494.000,00	2.892.171.788	58,10
Belanja Iuran Jaminan Kematian PPPK	-	-		978.251.000	423.404.776	978.251.000,00	423.404.776	43,28
Belanja Iuran Simpanan Peserta Tabungan Perumahan Rakyat PNS	-	-		3.718.262.000	-	3.718.262.000,00	-	0,00
Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	30.000.000	30.000.000	100,00			30.000.000,00	30.000.000	100,00
Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah								
Pendidikan dan Pelatihan Pegawai	172.500.000	15.780.000	9,15			172.500.000,00	15.780.000	9,15

PARAF KOORDINASI	
KEPALA BPKAD	
KEPALA BAPPELITBANGDA	
KABAG HUKUM	

Berdasarkan Tugas dan Fungsi									
Pengadaan Pakaian Dinas Lainnya	429.985.000,00	417.661.000	97,13				429.985.000,00	417.661.000	97,13
Administrasi Umum Perangkat Daerah									
Penyediaan Bahan Logistik Kantor	1.408.714.000	1.369.230.000	97,20				1.408.714.000,00	1.369.230.000	97,20
Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	160.000.000	153.810.000	96,13				160.000.000,00	153.810.000	96,13
Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	47.000.000	36.135.000	76,88				47.000.000,00	36.135.000	76,88
Fasilitasi Kunjungan Tamu	50.000.000	13.250.000	26,50				50.000.000,00	13.250.000	26,50
Penyelenggaraan Rapat Koordinasi	448.638.000	278.712.923	62,12				448.638.000,00	278.712.923	62,12

PARAF KOORDINASI	
KEPALA BPKAD	
KEPALA BAPPSELITBANGDA	
KABAG HUKUM	

dan Konsultasi SKPD										
Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	392.505.000,00	351.707.600	89,61				392.505.000,00	351.707.600	89,61	
Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah										
Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	611.517.000	597.250.000	97,67				611.517.000,00	597.250.000	97,67	
Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah										
Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	5.862.960.055,00	5.773.669.233	98,48				5.862.960.055,00	5.773.669.233	98,48	

PARAF KOORDINASI	
KEPALA BPKAD	
KEPALA BAPPELITBANGDA	
KABAG HUKUM	

Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah									
Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	448.320.500	393.292.200	87,73				448.320.500,00	393.292.200	87,73
Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau	200.000.000	133.734.500	66,87				200.000.000,00	133.734.500	66,87

PARAF KOORDINASI	
KEPALA BPKAD	
KEPALA BAPPELITBANGDA	
KABAG HUKUM	

	Lapangan									
	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	511.439.557,00	491.897.303	96,18				511.439.557,00	491.897.303	96,18
	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	197.900.000,00	196.865.000,00	99,48				197.900.000,00	196.865.000,00	99,48
	Program Pengelolaan Keuangan Daerah									
	Koordinasi dan Penyusunan Rencana Anggaran Daerah									
	Koordinasi dan Penyusunan KUA	85.440.000	61.784.125	72,31				85.440.000,00	61.784.125	72,31

PARAF KOORDINASI	
KEPALA BPKAD	
KEPALA BAPPELITBANGDA	
KABAG HUKUM	

dan PPAS									
Koordinasi dan Penyusunan Perubahan KUA dan Perubahan PPAS	65.700.000	55.246.250	84,09				65.700.000,00	55.246.250	84,09
Koordinasi , Penyusunan dan Verifikasi RKA-SKPD	46.160.000	38.071.900	82,48				46.160.000,00	38.071.900	82,48
Koordinasi , Penyusunan dan Verifikasi Perubahan RKA-SKPD	50.000.000	17.712.000	35,42				50.000.000,00	17.712.000	35,42
Koordinasi , Penyusunan dan Verifikasi DPA-SKPD	13.335.600	13.335.600	100				13.335.600,00	13.335.600	100

PARAF KOORDINASI	
KEPALA BPKAD	
KEPALA BAPPELITBANGDA	
KABAG HUKUM	

	Koordinasi , Penyusunan dan Verifikasi Perubahan DPA- SKPD	55.650.000	29.700.000	53,37				55.650.000,00	29.700.000	53,37
	Koordinasi dan Penyusunan Peraturan Daerah tentang APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran APBD	146.550.000	121.418.335	82,85				146.550.000,00	121.418.335	82,85
	Koordinasi dan Penyusunan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Perubahan APBD	149.650.000	146.599.600	97,96				149.650.000,00	146.599.600	97,96

PARAF KOORDINASI	
KEPALA BPKAD	
KEPALA BAPPELITBANGDA	
KABAG HUKUM	

	Koordinasi dan Penyusunan Regulasi Serta Kebijakan Bidang Anggaran	50.000.000	46.202.600	92,41				50.000.000,00	46.202.600	
	Koordinasi Perencanaan Anggaran Belanja Daerah	30.000.000,00	18.375.000	61,25				30.000.000,00	18.375.000	
	Koordinasi Perencanaan Anggaran Pembiayaan	215.119.000	197.477.000	91,80				215.119.000,00	197.477.000	91,80
	Koordinasi dan Pengelolaan Perbendaharaan Daerah									
	Koordinasi dan Pengelolaan Kas Daerah	104.355.000	86.677.440	83,06				104.355.000,00	86.677.440	83,06

PARAF KOORDINASI	
KEPALA BPKAD	
KEPALA BAPPELITBANGDA	
KABAG HUKUM	

Koordinasi dan Penyusunan Laporan Realisasi Penerimaan dan Pengeluaran Kas Daerah, Laporan Aliran Kas, dan Pelaksanaan Pemungutan/Pemot ongan dan Penyetoran Perhitungan Fihak Ketiga (PFK) Koordinasi, Fasilitasi, Asistensi, Sinkronisasi, Supervisi, Monitoring, dan Evaluasi Pengelolaan Dana	53.961.000	37.551.000	69,59				53.961.000,00	37.551.000	69,59
	48.200.000,00	33.958.784	70,45				48.200.000,00	33.958.784	70,45

PARAF KOORDINASI	
KEPALA BPKAD	
KEPALA BAPPELITBANGDA	
KABAG HUKUM	

Perimbangan dan Dana Transfer Lainnya									
Pembinaan Penatausahaan Keuangan Pemerintah Kabupaten/Kota	64.906.000	57.510.000	88,61				64.906.000,00	57.510.000	88,61
Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi dan Pelaporan Keuangan									
Koordinasi Pelaksanaan Akuntansi Penerimaan dan Pengeluaran Kas Daerah	50.000.000	48.465.250	96,93				50.000.000,00	48.465.250	96,93

PARAF KOORDINASI	
KEPALA BPKAD	
KEPALA BAPPSELITBANGDA	
KABAG HUKUM	

	Rekonsiliasi dan Verifikasi Aset, Kewajiban, Ekuitas, Pendapatan, Belanja, Pembiayaan, Pendapatan-LO dan Beban	43.200.000	39.930.800	92,43				43.200.000,00	39.930.800	92,43
	Koordinasi Penyusunan Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Bulanan, Triwulan dan Semesteran	119.175.000	117.455.425	98,56				119.175.000,00	117.455.425	98,56
	Konsolidasi Laporan Keuangan,Keuangan SKPD, BLUD dan Laporan Keuangan	131.955.000	123.807.559	93,83				131.955.000,00	123.807.559	93,83

PARAF KOORDINASI	
KEPALA BPKAD	
KEPALA BAPPELITBANGDA	
KABAG HUKUM	

Pemerintah Daerah									
Koordinasi dan Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Provinsi dan Rancangan Kepala Daerah tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten/Kota	141.290.000	121.131.000	85,73				141.290.000,00	121.131.000	85,73
Penyusunan Kebijakan dan	174.345.000	144.185.500	82,70				174.345.000,00	144.185.500	82,70

PARAF KOORDINASI	
KEPALA BPKAD	
KEPALA BAPPELITBANGDA	
KABAG HUKUM	

	Panduan Teknis Operasional Penyelenggaraan Akuntansi									
	Penyusunan Sistem dan Prosedur Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Pemerintah Daerah	263.000.000,00	260.386.300	99,01				263.000.000,00	260.386.300	99,01
	Pembinaan Akuntansi, Pelaporan dan Pertanggung jawaban Pemerintah Kabupaten/ Kota	214.815.000,00	203.056.500	94,53				214.815.000,00	203.056.500	94,53
	Pembinaan Pengelolaan Keuangan BLUD Kabupaten /Kota	41.400.000	34.254.825	82,74				41.400.000,00	34.254.825	82,74

PARAF KOORDINASI	
KEPALA BPKAD	
KEPALA BAPPELITBANGDA	
KABAG HUKUM	

Program Pengelolaan Barang Milik Daerah									
Pengelolaan Barang Milik Daerah									
Penatausahaan Barang Milik Daerah	50.863.000	23.943.000	47,07				50.863.000,00	23.943.000	47,07
Inventarisasi Barang Mili Daerah	112.900.000	68.964.445	61,08				112.900.000,00	68.964.445	61,08
Pengamanan Barang Milik Daerah	804.650.000	513.450.000	63,81				804.650.000,00	513.450.000	63,81
Optimalisasi Penggunaan, Pemanfaatan, Pemindahtanganan, Pemusnahan, dan Penghapusan Barang Milik Daerah	639.150.000,00	204.455.900	31,99				639.150.000,00	204.455.900	31,99

PARAF KOORDINASI	
KEPALA BPKAD	
KEPALA BAPPELITBANGDA	
KABAG HUKUM	

Pembinaan Pengelolaan Barang Milik Daerah Pemerintah Kabupaten/Kota	67.650.000	22.410.000	33,13				67.650.000,00	22.410.000	33,13
Penyusunan Standar Harga	186.924.000	165.296.500	88,43				186.924.000,00	165.296.500	88,43
Penunjang Urusan Kewenangan Pengelolaan Keuangan Daerah									
Analisis Perencanaan dan Penyaluran Bantuan Keuangan				50.000.000.000,00	50.000.000.000,00	100	50.000.000.000,00	50.000.000.000	100,00
Pengelolaan Dana Darurat dan Mendesak				41.375.474.787,00	4.232.137.045	10,23	41.375.474.787,00	4.232.137.045	10,23

PARAF KOORDINASI	
KEPALA BPKAD	
KEPALA BAPPELITBANGDA	
KABAG HUKUM	

TOTAL	40.063.503.245,00	37.420.732.603,00	93,40	195.684.951.254,00	111.150.688.466,00	56,80	235.748.454.499,00	148.571.421.069,00	63,02
-------	-------------------	-------------------	-------	--------------------	--------------------	-------	--------------------	--------------------	-------

*Sumber data Aplikasi SIMDA tahun 2023*

PARAF KOORDINASI	
KEPALA BPKAD	
KEPALA BAPPELITBANGDA	
KABAG HUKUM	

Tabel 2.1.2

REKAPITULASI EVALUASI HASIL PELAKSANAAN RENJA BPKAD DAN  
PENCAPAIAN RENSTRA BPKAD TAHUN 2023- 2024  
KOTA BEKASI

NO	URUSAN/ BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN PROGRAM/ KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME)/ KEGIATAN (OUTPUT)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra BPKAD) Tahun 2018 - 2023	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d Tahun 2023	TARGET DAN REALISASI KINERJA PROGRAM DAN KEGIATAN TAHUN 2023			TARGET PROGRAM DAN KEGIATAN TAHUN 2024	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun Berjalan (2023)		Ket
					TARGET 2023	REALISASI 2023	TINGKAT REALISASI (%)		REALISASI CAPAIAN PROGRAM DAN KEGIATAN S/D TAHUN BERJALAN TAHUN (n- 1)2024	TINGKAT CAPAIAN REALISASI TARGET RENSTRA (%)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN/ KOTA										

PARAF KOORDINASI	
KEPALA BPKAD	
KEPALA BAPPELITBANGDA	
KABAG HUKUM	

I	Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah										
1	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	4 Laporan	4 Laporan	4 Laporan	4 Laporan	100%	4 Laporan			
II	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah										
2	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	2.788 Orang/bulan	2.788 Orang/bulan	2.788 Orang/bulan	2.788 Orang/bulan	100%	2.788 Orang/bulan			
3	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD & Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan	1 Laporan	1 Laporan	1 Laporan	1 Laporan	100%	1 Laporan			
III	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah										
4	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapan	172 Paket	172 Paket	172 Paket	168 Paket	97,13 %	172 Paket			
5	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	18 Orang	18 Orang	18 Orang	9 Orang	9.15%	18 Orang			

PARAF KOORDINASI	
KEPALA BPKAD	
KEPALA BAPPSELITBANGDA	
KABAG HUKUM	

6	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Peserta Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-undangan	72 Orang	0	0	0	0	0			
IV	Administrasi Umum Perangkat Daerah										
7	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Peralatan Gedung Kantor	24 Unit	24 Unit	0	0	0	0			
8	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	8 Paket	8 Paket	8 Paket	8 Paket	100%	8 Paket			
9	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	2 Paket	2 Paket	2 Paket	2 Paket	100%	2 Paket			
10	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan yang Disediakan	9 Jenis	9 Jenis	9 Jenis	9 Jenis	100%	9 Jenis			
11	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	35 Laporan	35 Laporan	35 Laporan	24 Laporan	68.57%	35 Laporan			
12	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	201 Laporan	201 Laporan	201 Laporan	181 Laporan	90.05%	201 Laporan			

PARAF KOORDINASI	
KEPALA BPKAD	
KEPALA BAPPSELITBANGDA	
KABAG HUKUM	

13	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	1.888 Box	1.888 Box	1.888 Box	1.888 Box	100%	1.888 Box			
14	Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	Jumlah Peralatan dan Perlengkapan kantor yang tersedia	50 Unit	0	0	0	0	0			
V	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah										
15	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 Laporan	12 Laporan	12 Laporan	12 Laporan	100%	12 Laporan			
	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah										
	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin yang disediakan	46 Unit	46 Unit	46 Unit	46 Unit	100%	46 Unit			
VI	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah										
16	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas/ Kendaraan Dinas Jabatan yang di pelihara dan dibayarkan pajaknya	21 Unit	21 Unit	21 Unit	21 Unit	100%	21 Unit			

PARAF KOORDINASI	
KEPALA BPKAD	
KEPALA BAPPELITBANGDA	
KABAG HUKUM	

17	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah kendaraan Dinas Operasional/ Lapangan yang dipelihara dan dibayarkan pajak dan perizinannya	69 Unit	69 Unit	69 Unit	69 Unit	100%	69 Unit			
18	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang dipelihara/ direhabilitasi	80 Unit	80 Unit	80 Unit	80 Unit	100%	80 Unit			
	PROGRAM PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH										
		Ketepatan waktu penetapan APBD	Grade A	Grade A	Grade A	Grade A	100%	Grade A			
		Persentase Kesesuaian DPA dengan Penjabaran APBD	100%	100%	100%	100%	100%	100%			
		3. Presentase Kesesuaian pelaporan keuangan dengan SAP dan Tepat Waktu	100%	100%	100%	100%	100%	100%			
		4. Presentase Kesesuaian Pelaporan Penerbitan SP2D dengan SPD dan SPM yang diterima	100%	100%	100%	100%	100%	100%			
		5. Presentase OPD Yang Melaksanakan Administrasi Penatausahaan Keuangan dengan Tertib	100%	100%	100%	100%	100%	100%			

PARAF KOORDINASI	
KEPALA BPKAD	
KEPALA BAPPELITBANGDA	
KABAG HUKUM	

VII	Koordinasi dan Penyusunan Rencana Anggaran Daerah										
19	Koordinasi dan Penyusunan KUA dan PPAS	Jumlah Dokumen KUA dan PPAS yang Disusun	2 dokumen	2 dokumen	2 dokumen	2 dokumen	100%	2 dokumen			
20	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan KUA dan Perubahan PPAS	Jumlah Dokumen Perubahan KUA dan Perubahan PPAS yang Disusun	2 dokumen	2 dokumen	2 dokumen	2 dokumen	100%	2 dokumen			
21	Koordinasi, Penyusunan dan Verifikasi RKA-SKPD	Jumlah RKA-SKPD yang Diverifikasi	1 dokumen	1 dokumen	1 dokumen	1 dokumen	100%	1 dokumen			
22	Koordinasi, Penyusunan dan Verifikasi Perubahan RKA-SKPD	Jumlah Perubahan RKA-SKPD yang Diverifikasi	1 dokumen	1 dokumen	1 dokumen	1 dokumen	100%	1 dokumen			
23	Koordinasi, Penyusunan dan Verifikasi DPA-SKPD	Jumlah DPA- SKPD yang Diverifikasi	1 dokumen	1 dokumen	1 dokumen	1 dokumen	100%	1 dokumen			
24	Koordinasi, Penyusunan dan Verifikasi Perubahan DPA-SKPD	Jumlah Perubahan DPA-SKPD yang Diverifikasi	1 dokumen	1 dokumen	1 dokumen	1 dokumen	100%	1 dokumen			
25	Koordinasi dan Penyusunan Peraturan Daerah tentang APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran APBD	Jumlah Peraturan Daerah tentang APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran APBD	4 Dokumen	4 Dokumen	4 Dokumen	4 Dokumen	100%	4 Dokumen			
26	Koordinasi dan Penyusunan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Perubahan APBD	Jumlah Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Perubahan APBD	6 Dokumen	6 Dokumen	6 Dokumen	6 Dokumen	100%	6 Dokumen			

PARAF KOORDINASI	
KEPALA BPKAD	
KEPALA BAPPELITBANGDA	
KABAG HUKUM	

27	Koordinasi, Penyusunan Regulasi Serta Kebijakan Bidang Anggaran	Jumlah Dokumen Regulasi serta Kebijakan Bidang Anggaran	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	100%	1 Dokumen			
28	Koordinasi Perencanaan Anggaran Belanja Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi Perencanaan Anggaran Belanja Daerah	2 Dokumen	2 Dokumen	2 Dokumen	2 Dokumen	100%	2 Dokumen			
29	Koordinasi Perencanaan Anggaran Pembiayaan	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi Perencanaan Anggaran Pembiayaan	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	100%	1 Dokumen			
30	Pembinaan Penganggaran Daerah Pemerintah Kabupaten/Kota	Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Penganggaran Daerah Pemerintah Kabupaten/Kota	74 Orang	74 Orang	74 Orang	74 Orang	100%	74 Orang			
VIII	Koordinasi dan Pengelolaan Perbendaharaan Daerah	Presentase Kesesuaian Pelaporan Penerbitan SP2D dengan SPM yang diterima	100%	100%	100%	100%	100%	100%			
		Presentase OPD Yang Melaksanakan Administrasi Penatausahaan Keuangan dengan Tertib	100%	100%	100%	100%	100%	100%			
31	Koordinasi dan Pengelolaan Kas Daerah						100%				

PARAF KOORDINASI	
KEPALA BPKAD	
KEPALA BAPPELITBANGDA	
KABAG HUKUM	

		Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Pengelolaan Kas Daerah	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen		1 Dokumen			
32	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Realisasi Penerimaan dan Pengeluaran Kas Daerah, Laporan Aliran Kas, dan Pelaksanaan Pemungutan/Pemotongan dan Penyetoran Perhitungan Fihak Ketiga (PFK)	Jumlah laporan Koordinasi dan Penyusunan Laporan Realisasi Penerimaan dan Pengeluaran Kas Daerah, Laporan Aliran Kas, dan Pelaksanaan Pemungutan/Pemotongan dan Penyetoran Perhitungan Fihak Ketiga (PFK)	1 laporan	1 laporan	1 laporan	1 laporan	100%	1 laporan			
33	Pembinaan Penatausahaan Keuangan Pemerintah Kabupaten/Kota	Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Penatausahaan Keuangan Pemerintah Kabupaten/Kota	110 orang	110 orang	110 orang	110 orang	100%	110 orang			
	Koordinasi, Fasilitasi, Asistensi, Sinkronisasi, Supervisi, Monitoring dan Evaluasi Pengelolaan Dana Perimbangan dan Dana Transfer Lainnya	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Fasilitasi, Asistensi, Sinkronisasi, Supervisi, Monitoring, dan Evaluasi Pengelolaan Dana Perimbangan dan Dana Transfer Lainnya	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	100%	1 Dokumen			
	Rekonsiliasi Data Penerimaan dan Pengeluaran Kas serta Pemungutan dan Pemotongan Atas SP2D dengan Instansi Terkait	Jumlah Dokumen Hasil Rekonsiliasi Data Penerimaan dan Pengeluaran Kas serta Pemungutan dan Pemotongan atas SP2D dengan Instansi Terkait	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	100%	1 Dokumen			

PARAF KOORDINASI	
KEPALA BPKAD	
KEPALA BAPPSELITBANGDA	
KABAG HUKUM	

IX	Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Daerah										
34	Rekonsiliasi dan Verifikasi Aset Kewajiban Ekuitas, Pendapatan Belanja Pembiayaan Pendapatan - LO dan Beban	Jumlah Dokumen Hasil Rekonsiliasi dan Verifikasi Aset, Kewajiban, Ekuitas, Pendapatan, Belanja, Pembiayaan, Pendapatan-LO, dan Beban	4 Dokumen	4 Dokumen	4 Dokumen	4 Dokumen	100%	4 Dokumen			
35	Koordinasi Penyusunan Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Bulanan, Triwulanan dan Semesteran	Jumlah Laporan Pertanggungjawaban APBD Bulanan, Triwulanan dan Semesteran	4 Dokumen	4 Dokumen	4 Dokumen	4 Dokumen	100%	4 Dokumen			
36	Konsolidasi Laporan Keuangan SKPD, BLUD dan Laporan Pemerintah Daerah	Jumlah Laporan Keuangan SKPD, BLUD dan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah yang Terkonsolidasi	2 Laporan	2 Laporan	2 Laporan	2 Laporan	100%	2 Laporan			
37	Koordinasi dan Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Provinsi dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten/Kota	Jumlah Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten/Kota dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten/Kota	2 Dokumen	2 Dokumen	2 Dokumen	2 Dokumen	100%	2 Dokumen			
38	Penyusunan Kebijakan dan Panduan Teknis Operasional Penyelenggaraan Akuntansi Pemerintah Daerah	Jumlah Kebijakan dan Panduan Teknis Operasional Penyelenggaraan Akuntansi Pemerintah Daerah	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	100%	1 Dokumen			

PARAF KOORDINASI	
KEPALA BPKAD	
KEPALA BAPPSELITBANGDA	
KABAG HUKUM	

39	Penyusunan Sistem dan Prosedur Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Pemerintah Daerah	Jumlah Sistem dan Prosedur Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Pemerintah Daerah	3 Dokumen	3 Dokumen	3 Dokumen	3 Dokumen	100%	3 Dokumen			
40	Pembinaan Akuntansi, Pelaporan dan Pertanggungjawaban Pemerintah Kabupaten/ Kota	Jumlah Orang yang mengikuti Pembinaan Akuntansi, Pelaporan dan Pertanggungjawaban Pemerintah Kabupaten/Kota	147 orang	147 orang	147 orang	147 orang	100%	147 orang			
	Pembinaan Pengelolaan Keuangan BLUD Kabupaten/Kota	Jumlah BLUD Kabupaten/Kota yang Dibina	53 Lembaga	53 Lembaga	53 Lembaga	53 Lembaga	100%	53 Lembaga			
	Koordinasi Pelaksanaan Akuntansi Penerimaan dan Pengeluaran Kas Daerah	Jumlah Laporan Hasil Koordinasi Pelaksanaan Akuntansi Penerimaan dan Pengeluaran Kas Daerah	4 Laporan	4 Laporan	4 Laporan	4 Laporan	100%	4 Laporan			
	Penunjang Urusan Kewenangan Pengelolaan Daerah										
41	Pengelolaan Dana Darurat dan Mendesak	Jumlah Laporan Hasil Pengelolaan Dana Darurat dan Mendesak	1 laporan	1 laporan	1 laporan	1 laporan	100%	1 laporan			
	PROGRAM PENGELOLAAN BARANG MILIK DAERAH	Persentase Nilai Aset antara LBMD dengan LKPD	100%	100%	100%	100%	100%	100%			
		Jumlah Bidang tanah milik pemkot yang bersertifikat	2.302 Bidang	828 Bidang	554 Bidang	84 Bidang	100%	554 Bidang			

PARAF KOORDINASI	
KEPALA BPKAD	
KEPALA BAPPELITBANGDA	
KABAG HUKUM	

X	PENGELOLAAN BARANG MILIK DAERAH										
42	Penatausahaan Barang Milik Daerah	Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah	1 laporan	1 laporan	1 laporan	1 laporan	100%	1 laporan			
43	Inventarisasi Barang Milik Daerah	Jumlah Laporan Hasil Inventarisasi (LHI) Barang Milik Daerah	1 laporan	1 laporan	1 laporan	1 laporan	100%	1 laporan			
44	Pengamanan Barang Milik Daerah	Jumlah Laporan Hasil Pengamanan Barang Milik Daerah	1 laporan	1 laporan	1 laporan	1 laporan	100%	1 laporan			
45	Optimalisasi Penggunaan, Pemanfaatan, Pemindahtanganan, Pemusnahan, dan Penghapusan Barang Milik Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Optimalisasi Penggunaan, Pemanfaatan, Pemindahtanganan, Pemusnahan, dan Penghapusan Barang Milik Daerah	5 Dokumen	5 Dokumen	5 Dokumen	5 Dokumen	100%	5 Dokumen			

PARAF KOORDINASI	
KEPALA BPKAD	
KEPALA BAPPELITBANGDA	
KABAG HUKUM	

	Penyusunan Standar Harga	Jumlah Standar Harga yang Disusun	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	100%	1 Dokumen			
	Pembinaan Pengelolaan Barang Milik Daerah Pemerintah Kabupaten/Kota	Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Pengelolaan Barang Milik Daerah Pemerintah Kabupaten/Kota	90 Orang	90 Orang	90 Orang	90 Orang	100%	90 Orang			

PARAF KOORDINASI	
KEPALA BPKAD	
KEPALA BAPPELITBANGDA	
KABAG HUKUM	

## 2.2. Analisis Kinerja Pelayanan SKPD

Analisis pencapaian kinerja Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kota Bekasi dari 1 sasaran dan 1 Indikator Kinerja Utama (IKU) yang telah ditetapkan di dalam Perjanjian Kinerja (PK) Tahun 2020 dan 7 Indikator Program dapat dilihat pada Tabel 2.2 (T.C.30) sebagai berikut :

PARAF KOORDINASI	
KEPALA BPKAD	
KEPALA BAPPELITBANGDA	
KABAG HUKUM	

Tabel 2.2.1  
Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah dan  
Pencapaian Renstra Perangkat Daerah s.d Tahun 2023

No	INDIKATOR	SPM/ Standar Nasional	IKK	INDIKATOR KINERJA SASARAN PEMERINTAH DAERAH (PERMENDAGRI 86 Tahun 2017)	INDIKATOR KINERJA OUTCOME PEMERINTAH DAERAH (PERMENDAGRI 86 Tahun 2017)	INDIKATOR MANDIRI	TARGET RENSTRA				REALISASI CAPAIAN		PROYEKSI	
							2020	2021	2022	2023	2022	2023	2022	2023
1	Opini BPK terhadap Laporan Keuangan Daerah		OPINI BPK	OPINI BPK	OPINI BPK		WTP	WTP	WTP	WTP	WTP	WDP	WTP	WTP
2	Kesesuaian pelaporan keuangan dengan SAP					Tersusunnya Laporan Keuangan Pemerintah Kota Bekasi dengan	1 Dok	1 Dok	Sesuai	Sesuai	1 Dok	1 Dok	Sesuai	Sesuai

PARAF KOORDINASI	
KEPALA BPKAD	
KEPALA BAPPELITBANGDA	
KABAG HUKUM	

						Standar Akuntansi Pemerintah (SAP) yang terdiri dari : Laporan Realisasi Anggaran (LRA), Laporan Operasional (LO), Neraca, Laporan Perubahan Ekuitas (LPE), Laporan Perubahan Sisa Anggaran Lebih (LPSAL), Laporan Arus Kas (LAK), Catatan atas Laporan Keuangan (CaLK)								
--	--	--	--	--	--	---	--	--	--	--	--	--	--	--

PARAF KOORDINASI	
KEPALA BPKAD	
KEPALA BAPPELITBANGDA	
KABAG HUKUM	

3	Kesesuaian nilai rincian total BMD dengan nilai aset tetap neraca Pemerintah Kota					Nilai Rincian BMD X 100 % Nilai Aktiva Tetap pada Neraca	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
4	Bidang tanah milik pemkot yang bersertifikat		Sertifikat Tanah Milik Pemerintah Kota Bekasi		Sertifikat Tanah Milik Pemerintah Kota Bekasi		20 Sertifikat	25 Sertifikat	554 Sertifikat	554 Sertifikat	168 Sertifikat	544 Sertifikat	554 Sertifikat	554 Sertifikat
6	Presentase dokumen DPA yang selesai tepat waktu					Jumlah Penyelesaian DPA yang Tepat Waktu X 100 % Jumlah DPA Keseluruhan	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
7	Ketepatan waktu penetapan APBD		A : TEPAT WAKTU (31/12/Tahun Sebelumnya) BOBOT = 5 B : Kurang Tepat Waktu (Minggu I Tahun setelahnya) BOBOT = 4 C : Tidak Tepat Waktu (Minggu II Tahun		A : TEPAT WAKTU (31/12/Tahun Sebelumnya) BOBOT = 5 B : Kurang Tepat Waktu (Minggu I Tahun setelahnya) BOBOT = 4 C : Tidak Tepat Waktu (Minggu II Tahun Setelahnya) BOBOT = 3D : Tidak Tepat Waktu (Minggu III Tahun		Grade A	Grade A	Grade A	Grade A	Grade D	Grade A	Grade A	Grade A

PARAF KOORDINASI	
KEPALA BPKAD	
KEPALA BAPPELITBANGDA	
KABAG HUKUM	

		Setelahnya) BOBOT = 3D : Tidak Tepat Waktu (Minggu III Tahun Setelahnya) BOBOT = 2E : Tidak Tepat Waktu (1 Bulan Tahun Setelahnya) BOBOT = 1 F : Tidak Tepat Waktu (1 Bulan Tahun Setelahnya) BOBOT = 0 G : Tidak Tepat Waktu (1 Bulan Tahun Setelahnya) BOBOT = - 1	Setelahnya) BOBOT = 2E : Tidak Tepat Waktu (1 Bulan Tahun Setelahnya) BOBOT = 1 F : Tidak Tepat Waktu (1 Bulan Tahun Setelahnya) BOBOT = 0 G : Tidak Tepat Waktu (1 Bulan Tahun Setelahnya) BOBOT = - 1								
--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

Sumber data Bidang BPKAD Tahun 2020 - 2022

PARAF KOORDINASI	
KEPALA BPKAD	
KEPALA BAPPELITBANGDA	
KABAG HUKUM	

PARAF KOORDINASI	
KEPALA BPKAD	
KEPALA BAPPELITBANGDA	
KABAG HUKUM	

### 2.3. Isu-Isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi BPKAD Kota Bekasi

BPKAD Kota Bekasi dalam pelaksanaan Program dan Kegiatan untuk mencapai target pada Indikator Kinerja didasarkan atas tugas dan kewenangannya sebagai perangkat daerah yang menyelenggarakan fungsi penunjang urusan pemerintahan Bidang Keuangan Daerah sebagaimana tercantum dalam Peraturan Wali Kota Bekasi Nomor 65 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Pokok dan Fungsi serta Tata Kerja pada Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kota Bekasi.

PARAF KOORDINASI	
KEPALA BPKAD	
KEPALA BAPPELITBANGDA	
KABAG HUKUM	

**TABEL 2.3.1**  
**Isu-Isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi BPKAD Kota Bekasi**

NO	AKAR MASALAH	MASALAH	MASALAH POKOK	ISU STRATEGIS	NO	PRIORITAS PEMBANGUNAN	NO	PROGRAM PRIORITAS	DATA PENDUKUNG*)
								(sesuai Nomenklatur Permendagri No.90 Tahun 2019)	
1	Masih kurangnya implementasi regulasi dalam pelaksanaan dan penatausahaan Pendapatan, Belanja dan Pembiayaan	Peraturan perundang-undangan dan peraturan pelaksanaan	Adanya perubahan kebijakan peraturan perundang-undangan yang mengakibatkan penyesuaian terhadap peraturan yang berlaku yang mempengaruhi proses penatausahaan Pendapatan, Belanja dan Pembiayaan	Kinerja Pengelolaan Keuangan dan Barang Milik Daerah	1	Mencapai kinerja terbaik dalam pengelolaan keuangan daerah	1	Program Pengelolaan Keuangan Daerah	Permendagri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah

PARAF KOORDINASI	
KEPALA BPKAD	
KEPALA BAPPSELITBANGDA	
KABAG HUKUM	

2	Belum adanya petunjuk teknis terbaru yang mengatur tentang tata cara pembayaran dalam rangka pelaksanaan APBD	Peraturan perundang-undangan dan peraturan pelaksanaan	Adanya perubahan kebijakan peraturan perundang-undangan yang mengakibatkan penyesuaian terhadap peraturan yang berlaku yang mempengaruhi proses penatausahaan Pendapatan, Belanja dan Pembiayaan	Kinerja Pengelolaan Keuangan dan Barang Milik Daerah	Mencapai kinerja terbaik dalam pengelolaan keuangan daerah	Program Pengelolaan Keuangan Daerah	Peraturan Wali Kota Bekasi Nomor 65 Tahun 2013 tentang Tata Cara Pembayaran dalam rangka Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang belum disesuaikan dengan Permendagri Nomor 77 Tahun 2020
3	Tidak sinkronnya data penerimaan Kas Daerah Penghasil Pajak dan Data Penerimaan dan Pengeluaran Kas Daerah Bank Persepsi serta Pelaporan yang tidak teradministrasi dengan baik	Peraturan perundang-undangan dan peraturan pelaksanaan	Adanya perubahan kebijakan peraturan perundang-undangan yang mengakibatkan penyesuaian terhadap peraturan yang berlaku yang mempengaruhi proses penatausahaan Pendapatan, Belanja dan Pembiayaan	Kinerja Pengelolaan Keuangan dan Barang Milik Daerah	Mencapai kinerja terbaik dalam pengelolaan keuangan daerah	Program Pengelolaan Keuangan Daerah	Terdapat 25 % data penerimaan Kas Daerah Penghasil Pajak dan Data Penerimaan dan Pengeluaran Kas Daerah Bank Persepsi

PARAF KOORDINASI	
KEPALA BPKAD	
KEPALA BAPPELITBANGDA	
KABAG HUKUM	

4	Masih adanya ketidakpatuhan dan keterlambatan perangkat daerah dalam penyelesaian pertanggungjawaban Belanja	Kapasitas SDM keuangan/kegiatan di Perangkat Daerah	Penatausahaan Pembiayaan yang belum tertib dan taat pada peraturan yang berlaku	Kinerja Pengelolaan Keuangan dan Barang Milik Daerah	Mencapai kinerja terbaik dalam pengelolaan keuangan daerah	Program Pengelolaan Keuangan Daerah	Dalam satu tahun pembatalan SP2D
5	Terdapatnya Pelaporan penerimaan dan pengeluaran kas daerah yang tidak teradministrasi dengan baik	Kapasitas SDM pengelola keuangan/kegiatan di Perangkat Daerah	Penatausahaan Pendapatan, Belanja dan Pembiayaan yang belum tertib dan taat pada peraturan yang berlaku	Kinerja Pengelolaan Keuangan dan Barang Milik Daerah	Mencapai kinerja terbaik dalam pengelolaan keuangan daerah	Program Pengelolaan Keuangan Daerah	Pelaporan penerimaan dan pengeluaran kas daerah masih 25% yang teradministrasi dengan baik
6	Masih kurangnya Bimbingan Teknis tentang pengelolaan keuangan daerah kepada pengelola keuangan/kegiatan di perangkat daerah	Kapasitas SDM pengelola keuangan/kegiatan di Perangkat Daerah	Penatausahaan Pendapatan, Belanja dan Pembiayaan yang belum tertib dan taat pada peraturan yang berlaku	Kinerja Pengelolaan Keuangan dan Barang Milik Daerah	Mencapai kinerja terbaik dalam pengelolaan keuangan daerah	Program Pengelolaan Keuangan Daerah	Baru dilaksanakan Sosialisasi kepada OPD satu tahun hanya satu kali dengan waktu terbatas

PARAF KOORDINASI	
KEPALA BPKAD	
KEPALA BAPPELITBANGDA	
KABAG HUKUM	

7	Adanya mutasi dan rotasi pegawai di lingkungan Pemerintah Kota Bekasi yang mengakibatkan adanya perubahan pejabat pengelola keuangan/kegiatan di Perangkat Daerah	Kapasitas SDM pengelola keuangan/kegiatan di Perangkat Daerah	Penatausahaan Pendapatan, Belanja dan Pembiayaan yang belum tertib dan taat pada peraturan yang berlaku	Kinerja Pengelolaan Keuangan dan Barang Milik Daerah	Mencapai kinerja terbaik dalam pengelolaan keuangan daerah	Program Pengelolaan Keuangan Daerah	
8	Kurang tertibnya Bendahara Penerimaan Perangkat Daerah dalam penginputan pajak ke Simda yang sudah disetorkan ke Bank Jabar, sehingga terjadi perbedaan jumlah penerimaan antara penerimaan di Simda dengan jumlah penerimaan di Kas Daerah						Masih terdapat 25 % perbedaan jumlah penerimaan antara penerimaan di Simda dengan jumlah penerimaan di Kas Daerah
9	Kondisi sarana dan prasarana yang sudah tidak memadai	Sarana dan prasarana pendukung	Belum memadainya sarana dan prasarana pendukung kelancaran pelaksanaan dan penatausahaan Pendapatan, Belanja dan Pembiayaan	Kinerja Pengelolaan Keuangan dan Barang Milik Daerah	Mencapai kinerja terbaik dalam pengelolaan keuangan daerah	Program Pengelolaan Keuangan Daerah	Terdapatnya peralatan dan perlengkapan kantor yang sudah tidak layak guna

PARAF KOORDINASI	
KEPALA BPKAD	
KEPALA BAPPELITBANGDA	
KABAG HUKUM	

10	Belum terintegrasinya sistem aplikasi kas daerah dengan OPD penghasil	Sarana dan prasarana pendukung	Belum memadainya sarana dan prasarana pendukung kelancaran pelaksanaan dan penatausahaan Pendapatan, Belanja dan Pembiayaan	Kinerja Pengelolaan Keuangan dan Barang Milik Daerah		Mencapai kinerja terbaik dalam pengelolaan keuangan daerah		Program Pengelolaan Keuangan Daerah	Terdapat aplikasi internal yang bersifat pelaporan namun belum sampai tahap pengembangan yang terintegrasi
11	Sulitnya memberikan pemahaman terhadap stakeholder terkait tahapan penyusunan APBD	1. SDM	Masih adanya ketidakpatuhan dan keterlambatan dalam penyelesaian masing-masing tahapan penyusunan APBD	Kinerja Pengelolaan Keuangan dan Barang Milik Daerah		Mencapai kinerja terbaik dalam pengelolaan keuangan daerah		program pengelolaan keuangan daerah	1. Nota Kesepakatan antara Pemerintah Kota Bekasi dengan DPRD Kota Bekasi Nomor 179 Tahun 2022/08 Tahun 2022 tentang Perubahan Kebijakan Umum APBD Tahun Anggaran 2022 tanggal 01 September 2022, tidak tepat waktu seharusnya minggu kedua bulan Agustus

PARAF KOORDINASI	
KEPALA BPKAD	
KEPALA BAPPELITBANGDA	
KABAG HUKUM	

12	Masih adanya ketidakpahaman dan keterlambatan dalam penyelesaian masing-masing tahapan penyusunan APBD	Kapasitas SDM pengelola keuangan/kegiatan di Perangkat Daerah	Masih adanya ketidakpatuhan dan keterlambatan dalam penyelesaian masing-masing tahapan penyusunan APBD	Kinerja Pengelolaan Keuangan dan Barang Milik Daerah	Mencapai kinerja terbaik dalam pengelolaan keuangan daerah	Program pengelolaan keuangan daerah	2. Nota Kesepakatan antara Pemerintah Kota Bekasi dengan DPRD Kota Bekasi Nomor 180 Tahun 2022/09 Tahun 2022 tentang Perubahan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara Tahun Anggaran 2022 tanggal 01 September 2022, tidak tepat waktu seharusnya minggu kedua bulan Agustus
13	Kurangnya pemahaman OPD dalam proses penyusunan dokumen penganggaran terkait RKA dan DPA SKPD	Kapasitas SDM pengelola keuangan/kegiatan di Perangkat Daerah	Masih adanya ketidakpatuhan dan keterlambatan dalam penyelesaian masing-masing tahapan penyusunan APBD	Kinerja Pengelolaan Keuangan dan Barang Milik Daerah	Mencapai kinerja terbaik dalam pengelolaan keuangan daerah	Program pengelolaan keuangan daerah	

Sumber data Renstra BPKAD 2024 - 2026

PARAF KOORDINASI	
KEPALA BPKAD	
KEPALA BAPPELITBANGDA	
KABAG HUKUM	

## 2.4 Review Terhadap Rancangan Awal RKPD

Dari rancangan awal RKPD Kota Bekasi Tahun 2025, sebagian besar telah sesuai dengan hasil analisis kebutuhan perencanaan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah

Review terhadap rancangan RKPD selengkapnya dapat dilihat pada Tabel. T.C – 3.1 Terlampir

PARAF KOORDINASI	
KEPALA BPKAD	
KEPALA BAPPELITBANGDA	
KABAG HUKUM	

2.4.1.

Review terhadap Rancangan Awal RKPD 2024

Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah

No	RANCANGAN AWAL RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	URUSAN/ SKPD/ PROGRAM / KEGIATAN	LOKASI	KINERJA		PAGU	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Kebutuhan Dana	
			Indikator	Target	INDIKATIF						
	UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN										
	KEUANGAN					KEUANGAN					
	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA				147.277.092.700	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/ KOTA		Optimalisasi Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan		147.277.092.700	

PARAF KOORDINASI	
KEPALA BPKAD	
KEPALA BAPPELITBANGDA	
KABAG HUKUM	

	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah		Optimalisasi Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	100%	150.000.000	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah		Persentase Keterpenuhan Layanan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	100%	150.000.000	
	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Kota Bekasi	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	4 Laporan	150.000.000	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD		Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	4 Laporan	150.000.000	
	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah			100%	136.678.250.000	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah		Persentase Layanan Keuangan Perangkat Daerah	100%	136.678.250.000	
	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Kota Bekasi	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	2700 Orang/Bulan	136.668.250.000	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN		Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	2700 Orang/Bulan	136.668.250.000	

PARAF KOORDINASI	
KEPALA BPKAD	
KEPALA BAPPELITBANGDA	
KABAG HUKUM	

	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Kota Bekasi	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	1 Laporan	10.000.000	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD		Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	1 Laporan	10.000.000	
	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah				250.000.000	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah				250.000.000	
	Pengadaan Peralatan dan mesin lainnya	Kota Bekasi	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	15 Unit	250.000.000	Pengadaan Peralatan dan mesin lainnya		Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	15 Unit	250.000.000	
	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah		Optimalisasi Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur		570,000,000	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah		Optimalisasi Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur		570,000,000	

PARAF KOORDINASI	
KEPALA BPKAD	
KEPALA BAPPELITBANGDA	
KABAG HUKUM	

	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Kota Bekasi	Jumlah Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	178 Stel	200.000.000	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya		Jumlah Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	178 Stel	200.000.000	
	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Kota Bekasi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	19 Orang	120,000,000	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi		Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	19 Orang	120,000,000	
	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-undangan	Kota Bekasi	Jumlah Peserta	100 Orang	250.000.000	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-undangan		Jumlah Peserta	29 Orang	250.000.000	
	Administrasi Umum Perangkat Daerah		Optimalisasi Peningkatan sarana dan prasarana aparatur		2.595.000.000	Administrasi Umum Perangkat Daerah		Optimalisasi Peningkatan sarana dan prasarana aparatur		2.595.000.000	
	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Kota Bekasi	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	8 Paket	900.000.000	Penyediaan Bahan Logistik Kantor		Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	8 Paket	900.000.000	

PARAF KOORDINASI	
KEPALA BPKAD	
KEPALA BAPPSELITBANGDA	
KABAG HUKUM	

	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Kota Bekasi	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	2 Paket	200.000.000	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan		Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	2 Paket	200.000.000	
	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Kota Bekasi	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan yang Disediakan	9 Dokumen	50,000,000	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan		Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan yang Disediakan	9 Dokumen	50,000,000	
	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Kota Bekasi	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	35 Laporan	75,000,000	Fasilitasi Kunjungan Tamu		Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	35 Laporan	75,000,000	
	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Kota Bekasi	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	200 Laporan	360,000,000	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD		Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	200 Laporan	360,000,000	
	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Kota Bekasi	Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	1200 Dokumen	300.000.000	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD		Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	1200 Dokumen	300.000.000	

PARAF KOORDINASI	
KEPALA BPKAD	
KEPALA BAPPELITBANGDA	
KABAG HUKUM	

	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		Optimalisasi Pelayanan Administrasi Perkantoran		6.063.842.700	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		Optimalisasi Pelayanan Administrasi Perkantoran		6.063.842.700	
	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Kota Bekasi	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	78 Laporan	6.063.842.700	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor		Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	78 Laporan	6.063.842.700	
	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Kota Bekasi	Optimalisasi Pelayanan Administrasi Perkantoran		970.000.000	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		Optimalisasi Pelayanan Administrasi Perkantoran		970.000.000	
	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan	Kota Bekasi	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas/ Kendaraan Dinas Jabatan yang di pelihara dan dibayarkan	21 Unit	500,000,000	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan		Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas/ Kendaraan Dinas Jabatan yang di pelihara dan dibayarkan	21 Unit	500,000,000	

PARAF KOORDINASI	
KEPALA BPKAD	
KEPALA BAPPELITBANGDA	
KABAG HUKUM	

	dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan		pajaknya			dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan		pajaknya			
	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Kota Bekasi	Jumlah kendaraan Dinas Operasional/ Lapangan yang dipelihara dan dibayarkan pajak dan perizinannya	69 Unit	250,000,000	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan		Jumlah kendaraan Dinas Operasional/ Lapangan yang dipelihara dan dibayarkan pajak dan perizinannya	69 Unit	250,000,000	

PARAF KOORDINASI	
KEPALA BPKAD	
KEPALA BAPPELITBANGDA	
KABAG HUKUM	

Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Kota Bekasi	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang dipelihara/direhabilitasi	70 Unit	220.000.000	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang dipelihara/direhabilitasi	70 Unit	220.000.000
<b>PROGRAM PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH</b>				<b>79.630.240.000</b>	<b>PROGRAM PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH</b>			<b>79.630.240.000</b>
<b>Koordinasi dan Penyusunan Rencana Anggaran Daerah</b>	<b>Kota Bekasi</b>	<b>Ketepatan Waktu Penetapan APBD</b>  <b>Presentase Kesesuaian Dpa Dengan Penjabaran Apbd</b>		<b>1.980.885.000</b>	<b>Koordinasi dan Penyusunan Rencana Anggaran Daerah</b>	<b>Ketepatan Waktu Penetapan APBD</b>  <b>Presentase Kesesuaian Dpa Dengan Penjabaran Apbd</b>		<b>1.980.885.000</b>
Koordinasi dan Penyusunan KUA dan PPAS	Kota Bekasi	Jumlah Dokumen KUA dan PPAS yang Disusun	2 Dokumen	105.000.000	Koordinasi dan Penyusunan KUA dan	Jumlah Dokumen KUA dan PPAS yang Disusun	2 Dokumen	105.000.000

PARAF KOORDINASI	
KEPALA BPKAD	
KEPALA BAPPELITBANGDA	
KABAG HUKUM	

						PPAS					
	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan KUA dan Perubahan PPAS	Kota Bekasi	Jumlah Dokumen Perubahan KUA dan Perubahan PPAS yang Disusun	2 Dokumen	125.000.000	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan KUA dan Perubahan PPAS		Jumlah Dokumen Perubahan KUA dan Perubahan PPAS yang Disusun	2 Dokumen	125.000.000	
	Koordinasi, Penyusunan dan Verifikasi RKA-SKPD	Kota Bekasi	Jumlah RKA-SKPD yang Diverifikasi	1 Dokumen	64.330.000	Koordinasi, Penyusunan dan Verifikasi RKA-SKPD		Jumlah RKA-SKPD yang Diverifikasi	1 Dokumen	64.330.000	
	Koordinasi, Penyusunan dan Verifikasi Perubahan RKA-SKPD	Kota Bekasi	Jumlah RKA perubahan yang diverifikasi	1 Dokumen	64.330.000	Koordinasi, Penyusunan dan Verifikasi Perubahan RKA-SKPD		Jumlah RKA perubahan yang diverifikasi	1 Dokumen	64.330.000	
	Koordinasi, Penyusunan dan Verifikasi DPA-SKPD	Kota Bekasi	Jumlah DPA-SKPD yang Diverifikasi	1 Dokumen	59.575.000	Koordinasi, Penyusunan dan Verifikasi DPA-SKPD		Jumlah DPA-SKPD yang Diverifikasi	1 Dokumen	59.575.000	
	Koordinasi, Penyusunan dan	Kota	Jumlah Perubahan DPA-SKPD yang Diverifikasi	1 Dokumen		Koordinasi, Penyusunan		Jumlah Perubahan DPA-SKPD yang	1 Dokumen		

PARAF KOORDINASI	
KEPALA BPKAD	
KEPALA BAPPELITBANGDA	
KABAG HUKUM	

	Verifikasi Perubahan DPA-SKPD	Bekasi			62.650.000	dan Verifikasi Perubahan DPA-SKPD		Diverifikasi		62.650.000	
	Koordinasi dan Penyusunan Peraturan Daerah tentang APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran APBD	Kota Bekasi	Jumlah Peraturan Daerah tentang APBD dan Perkada tentang Penjabaran APBD	4 Dokumen	180.000.000	Koordinasi dan Penyusunan Peraturan Daerah tentang APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran APBD		Jumlah Peraturan Daerah tentang APBD dan Perkada tentang Penjabaran APBD	4 Dokumen	180.000.000	
	Koordinasi dan Penyusunan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran	Kota Bekasi	Jumlah Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Perubahan APBD	2 Peraturan	210.000.000	Koordinasi dan Penyusunan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD dan Peraturan Kepala		Jumlah Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Perubahan APBD	2 Peraturan	210.000.000	

PARAF KOORDINASI	
KEPALA BPKAD	
KEPALA BAPPELITBANGDA	
KABAG HUKUM	

	Perubahan APBD					Daerah tentang Penjabaran Perubahan APBD					
	Koordinasi dan Penyusunan Regulasi serta Kebijakan Bidang Anggaran	Kota Bekasi	Jumlah Dokumen Regulasi serta Kebijakan Bidang Anggaran	1 Dokumen	180.000.000	Koordinasi dan Penyusunan Regulasi serta Kebijakan Bidang Anggaran		Jumlah Dokumen Regulasi serta Kebijakan Bidang Anggaran	1 Dokumen	180.000.000	
	Koordinasi Perencanaan Anggaran Belanja Daerah	Kota Bekasi	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi Perencanaan Anggaran Belanja Daerah, Jumlah Peserta Sosialisasi	1 Dokumen	260.000.000	Koordinasi Perencanaan Anggaran Belanja Daerah		Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi Perencanaan Anggaran Belanja Daerah, Jumlah Peserta Sosialisasi	1 Dokumen	260.000.000	
	Koordinasi Perencanaan Anggaran Pembiayaan	Kota Bekasi	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi Perencanaan Anggaran Pembiayaan	1 Laporan	245.000.000	Koordinasi Perencanaan Anggaran Pembiayaan		Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi Perencanaan Anggaran Pembiayaan	1 Laporan	245.000.000	

PARAF KOORDINASI	
KEPALA BPKAD	
KEPALA BAPPELITBANGDA	
KABAG HUKUM	

	Pembinaan Penganggaran Daerah Pemerintah Kabupaten/Kota	Kota Bekasi	Jumlah peserta Pembinaan Penganggaran Daerah Pemerintah Kabupaten/Kota Sumber	77 Orang	425.000.000	Pembinaan Penganggaran Daerah Pemerintah Kabupaten/Kota		Jumlah peserta Pembinaan Penganggaran Daerah Pemerintah Kabupaten/Kota Sumber	77 Orang	425.000.000	
	<b>Koordinasi dan Pengelolaan Perbendaharaan Daerah</b>		<b>Persentase Kesesuaian Pelaporan Penerbitan SP2D dengan SPD dan SPM yang Diterima</b>  <b>Presentase Opd Yang Melaksanakan Administrasi Penatausahaan Keuangan Dengan Tertib</b>		<b>779.355.000</b>	<b>Koordinasi dan Pengelolaan Perbendaharaan Daerah</b>		<b>Persentase Kesesuaian Pelaporan Penerbitan SP2D dengan SPD dan SPM yang Diterima</b>  <b>Presentase Opd Yang Melaksanakan Administrasi Penatausahaan Keuangan Dengan Tertib</b>		<b>779.355.000</b>	
	Koordinasi dan Pengelolaan Kas Daerah	Kota Bekasi	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Pengelolaan Kas Daerah	1 Aplikasi	150.000.000	Koordinasi dan Pengelolaan Kas Daerah		Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Pengelolaan Kas Daerah	1 Aplikasi	150.000.000	
	Rekonsiliasi Data Penerimaan dan	Kota Bekasi	Jumlah Dokumen Hasil Rekonsiliasi Data Penerimaan dan	36 Dokumen	154.355.000	Rekonsiliasi Data Penerimaan dan		Jumlah Dokumen Hasil Rekonsiliasi Data Penerimaan dan	36 Dokumen	154.355.000	

PARAF KOORDINASI	
KEPALA BPKAD	
KEPALA BAPPELITBANGDA	
KABAG HUKUM	

	Pengeluaran Kas serta Pemungutan dan Pemotongan atas SP2D dengan Instansi Terkait		Pengeluaran Kas serta Pemungutan dan Pemotongan atas SP2D dengan Instansi Terkait			dan Pengeluaran Kas serta Pemungutan dan Pemotongan atas SP2D dengan Instansi Terkait		Pengeluaran Kas serta Pemungutan dan Pemotongan atas SP2D dengan Instansi Terkait			
	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Realisasi Penerimaan dan Pengeluaran Kas Daerah, Laporan Aliran Kas, dan Pelaksanaan Pemungutan/ Pemotongan dan Penyetoran Perhitungan Fihak ketiga	Kota Bekasi	Jumlah Laporan Realisasi Penerimaan dan Pengeluaran Kas Daerah, Laporan Aliran Kas, dan Pelaksanaan Pemungutan/ Pemotongan dan Penyetoran Perhitungan Fihak Ketiga (PFK) dan Laporan Hasil Koordinasi dalam rangka Penyusunan Laporan Realisasi Penerimaan dan Pengeluaran Kas Daerah, Laporan Aliran Kas, dan Pelaksanaan Pemungutan/ Pemotongan dan Penyetoran	2 Laporan	75.000.000	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Realisasi Penerimaan dan Pengeluaran Kas Daerah, Laporan Aliran Kas, dan Pelaksanaan Pemungutan/ Pemotongan dan		Jumlah Laporan Realisasi Penerimaan dan Pengeluaran Kas Daerah, Laporan Aliran Kas, dan Pelaksanaan Pemungutan/ Pemotongan dan Penyetoran Perhitungan Fihak Ketiga (PFK) dan Laporan Hasil Koordinasi dalam rangka Penyusunan Laporan Realisasi Penerimaan dan Pengeluaran Kas Daerah, Laporan Aliran Kas, dan Pelaksanaan Pemungutan/ Pemotongan dan Penyetoran	2 Laporan	75.000.000	

PARAF KOORDINASI	
KEPALA BPKAD	
KEPALA BAPPELITBANGDA	
KABAG HUKUM	

	(PFK)		Perhitungan Fihak Ketiga (PFK)			Penyetoran Perhitungan Fihak ketiga (PFK)		Perhitungan Fihak Ketiga (PFK)			
	Koordinasi, Fasilitasi, Asistensi, Sinkronisasi, Supervisi, Monitoring dan Evaluasi Pengelolaan Dana Perimbangan dan Dana Transfer Lainnya	Kota Bekasi	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Fasilitasi, Asistensi, Sinkronisasi, Supervisi, Monitoring, dan Evaluasi Pengelolaan Dana Perimbangan dan Dana Transfer Lainnya	1 Dokumen	50.000.000	Koordinasi, Fasilitasi, Asistensi, Sinkronisasi, Supervisi, Monitoring dan Evaluasi Pengelolaan Dana Perimbangan dan Dana Transfer		Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Fasilitasi, Asistensi, Sinkronisasi, Supervisi, Monitoring, dan Evaluasi Pengelolaan Dana Perimbangan dan Dana Transfer Lainnya	1 Dokumen	50.000.000	

PARAF KOORDINASI	
KEPALA BPKAD	
KEPALA BAPPELITBANGDA	
KABAG HUKUM	

						Lainnya					
	Penyusunan Petunjuk Teknis Administrasi Keuangan yang Berkaitan dengan Penerimaan dan Pengeluaran Kas serta Penatausahaan dan Pertanggungjawaban Sub Kegiatan	Kota Bekasi	Jumlah Petunjuk Teknis Administrasi Keuangan yang Berkaitan dengan Penerimaan dan Pengeluaran Kas serta Penatausahaan dan Pertanggungjawaban Sub Kegiatan	1 Dokumen	150.000.000	Penyusunan Petunjuk Teknis Administrasi Keuangan yang Berkaitan dengan Penerimaan dan Pengeluaran Kas serta Penatausahaan dan Pertanggungjawaban Sub Kegiatan		Jumlah Petunjuk Teknis Administrasi Keuangan yang Berkaitan dengan Penerimaan dan Pengeluaran Kas serta Penatausahaan dan Pertanggungjawaban Sub Kegiatan	1 Dokumen	150.000.000	
	Pembinaan Penatausahaan Keuangan Pemerintah Kabupaten/Kota	Kota Bekasi	Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Penatausahaan Keuangan Pemerintah Kabupaten/Kota	100 Orang	200.000.000	Pembinaan Penatausahaan Keuangan Pemerintah Kabupaten/Kota		Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Penatausahaan Keuangan Pemerintah Kabupaten/Kota	100 Orang	200.000.000	

PARAF KOORDINASI	
KEPALA BPKAD	
KEPALA BAPPELITBANGDA	
KABAG HUKUM	

Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Daerah		Persentase Kesesuaian Pelaporan Keuangan dengan SAP dan Tepat Waktu		1.870.000.000	Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Daerah		Persentase Kesesuaian Pelaporan Keuangan dengan SAP dan Tepat Waktu		1.870.000.000	
Koordinasi Pelaksanaan Akuntansi Penerimaan dan Pengeluaran Kas Daerah	Kota Bekasi	Jumlah Laporan Hasil Koordinasi Pelaksanaan Akuntansi Penerimaan dan Pengeluaran Kas Daerah	4 Laporan	265.000.000	Koordinasi Pelaksanaan Akuntansi Penerimaan dan Pengeluaran Kas Daerah		Jumlah Laporan Hasil Koordinasi Pelaksanaan Akuntansi Penerimaan dan Pengeluaran Kas Daerah	4 Laporan	265.000.000	
Rekonsiliasi dan Verifikasi Aset, Kewajiban, Ekuitas, Pendapatan, Belanja, Pembiayaan, Pendapatan-LO dan Beban	Kota Bekasi	Jumlah Dokumen Hasil Rekonsiliasi dan Verifikasi Aset, Kewajiban, Ekuitas, Pendapatan, Belanja, Pembiayaan, Pendapatan-LO, dan Beban	4 Dokumen	55.000.000	Rekonsiliasi dan Verifikasi Aset, Kewajiban, Ekuitas, Pendapatan, Belanja, Pembiayaan, Pendapatan-LO dan Beban		Jumlah Dokumen Hasil Rekonsiliasi dan Verifikasi Aset, Kewajiban, Ekuitas, Pendapatan, Belanja, Pembiayaan, Pendapatan-LO, dan Beban	4 Dokumen	55.000.000	

PARAF KOORDINASI	
KEPALA BPKAD	
KEPALA BAPPELITBANGDA	
KABAG HUKUM	

Koordinasi Penyusunan Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Bulanan, Triwulanan dan Semesteran	Kota Bekasi	Jumlah Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Bulanan, Triwulanan dan Semesteran	3 Laporan	200.000.000	Koordinasi Penyusunan Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Bulanan, Triwulanan dan Semesteran	Jumlah Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Bulanan, Triwulanan dan Semesteran	3 Laporan	200.000.000
Konsolidasi Laporan Keuangan SKPD, BLUD dan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah	Kota Bekasi	Jumlah Laporan Keuangan SKPD, BLUD dan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah yang Terkonsolidasi	2 Laporan	175.000.000	Konsolidasi Laporan Keuangan SKPD, BLUD dan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah	Jumlah Laporan Keuangan SKPD, BLUD dan Laporan Keuangan yang Terkonsolidasi	2 Laporan	175.000.000
Koordinasi dan Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban	Kota Bekasi	Jumlah Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten/Kota dan	2 Dokumen	175.000.000	Koordinasi dan Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah	Jumlah Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten/Kota dan	2 Dokumen	175.000.000

PARAF KOORDINASI	
KEPALA BPKAD	
KEPALA BAPPELITBANGDA	
KABAG HUKUM	

aban Pelaksanaan APBD Provinsi dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten/Kota		Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten/Kota				tentang Pertanggungja waban Pelaksanaan APBD Provinsi dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Pertanggungja waban Pelaksanaan APBD Kabupaten/Kot a		Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten/Kota			
Penyusunan Kebijakan dan Panduan Teknis Operasional Penyelenggaraa n Akuntansi Pemerintah	Kota Bekasi	Jumlah Kebijakan dan Panduan Teknis Operasional Penyelenggaraan Akuntansi Pemerintah Daerah	3 Dokumen	200.000.000	Penyusunan Kebijakan dan Panduan Teknis Operasional Penyelenggar aan Akuntansi		Jumlah Kebijakan dan Panduan Teknis Operasional Penyelenggaraan Akuntansi Pemerintah Daerah	3 Dokumen	200.000.000		

PARAF KOORDINASI	
KEPALA BPKAD	
KEPALA BAPPELITBANGDA	
KABAG HUKUM	

	Daerah					Pemerintah Daerah					
	Penyusunan Sistem dan Prosedur Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Pemerintah Daerah	Kota Bekasi	Jumlah Sistem dan Prosedur Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Pemerintah Daerah	5 Dokumen	450.000.000	Penyusunan Sistem dan Prosedur Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Pemerintah Daerah		Jumlah Sistem dan Prosedur Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Pemerintah Daerah	5 Dokumen	450.000.000	
	Pembinaan Akuntansi, Pelaporan dan Pertanggungjawaban Pemerintah Kabupaten/Kota	Kota Bekasi	Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Akuntansi, Pelaporan dan Pertanggungjawaban Pemerintah Kabupaten/Kota	44 Orang	250.000.000	Pembinaan Akuntansi, Pelaporan dan Pertanggungjawaban Pemerintah Kabupaten/Kota		Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Akuntansi, Pelaporan dan Pertanggungjawaban Pemerintah Kabupaten/Kota	44 Orang	250.000.000	
	Pembinaan Pengelolaan Keuangan BLUD Kabupaten/Kota	Kota Bekasi	Jumlah BLUD Kabupaten/Kota yang Dibina	53 Lembaga	100.000.000	Pembinaan Pengelolaan Keuangan BLUD Kabupaten/Kota		Jumlah BLUD Kabupaten/Kota yang Dibina	53 Lembaga	100.000.000	

PARAF KOORDINASI	
KEPALA BPKAD	
KEPALA BAPPELITBANGDA	
KABAG HUKUM	

	<b>PROGRAM PENGELOLAAN BARANG MILIK DAERAH</b>				<b>3.750.000.000</b>	<b>PROGRAM PENGELOLAAN BARANG MILIK DAERAH</b>				<b>3.750.000.000</b>	
	<b>Pengelolaan Barang Milik Daerah</b>		<b>Persentase Nilai Aset Antara LBMD Dengan LKPD</b>		<b>3.750.000.000</b>	<b>Pengelolaan Barang Milik Daerah</b>		<b>Persentase Nilai Aset Antara LBMD Dengan LKPD</b>		<b>3.750.000.000</b>	
			<b>Bidang Tanah Milik Pemkot Bekasi</b>					<b>Bidang Tanah Milik Pemkot Bekasi</b>			
	Penyusunan Standar Harga	Kota Bekasi	Jumlah Standar Harga yang Disusun	1 Laporan	400.000.000	Penyusunan Standar Harga		Jumlah Standar Harga yang Disusun	1 Laporan	400.000.000	
	Penatausahaan Barang Milik Daerah	Kota Bekasi	Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah	1 Laporan	300.000.000	Penatausahaan Barang Milik Daerah		Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah	1 Laporan	300.000.000	
	Inventarisasi Barang Milik Daerah	Kota Bekasi	Jumlah Laporan Hasil Inventarisasi (LHI) Barang Milik Daerah	1 Laporan	300.000.000	Inventarisasi Barang Milik Daerah		Jumlah Laporan Hasil Inventarisasi (LHI) Barang Milik Daerah	1 Laporan	300.000.000	
	Pengamanan Barang Milik Daerah	Kota Bekasi	Jumlah Laporan Hasil Pengamanan Barang Milik Daerah	3 Laporan	1.000.000.000	Pengamanan Barang Milik Daerah		Jumlah Laporan Hasil Pengamanan Barang Milik Daerah	3 Laporan	1.000.000.000	
	Optimalisasi Penggunaan, Pemanfaatan, Pemindahtangan	Kota Bekasi	Jumlah Dokumen Hasil Optimalisasi Penggunaan, Pemanfaatan,	5 Dokumen	250.000.000	Optimalisasi Penggunaan, Pemanfaatan, Pemindahtangan		Jumlah Dokumen Hasil Optimalisasi Penggunaan, Pemanfaatan,	5 Dokumen	250.000.000	

PARAF KOORDINASI	
KEPALA BPKAD	
KEPALA BAPPELITBANGDA	
KABAG HUKUM	

	an, Pemusnahan dan Penghapusan Barang Milik Daerah		Pemindahtanganan, Pemusnahan, dan Penghapusan Barang Milik Daerah			anan, Pemusnahan dan Penghapusan Barang Milik Daerah		Pemindahtanganan, Pemusnahan, dan Penghapusan Barang Milik Daerah			
	Pembinaan Pengelolaan Barang Milik Daerah Pemerintah Kabupaten/ Kota	Kota Bekasi	Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Pengelolaan Barang Milik Daerah Pemerintah Kabupaten/Kota	150 Orang	150.000.000	Pembinaan Pengelolaan Barang Milik Daerah Pemerintah Kabupaten/ Kota		Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Pengelolaan Barang Milik Daerah Pemerintah Kabupaten/Kota	150 Orang	150.000.000	
	Penilaian Barang Milik Daerah	Kota Bekasi	Jumlah Laporan Hasil Penilaian Barang Milik Daerah dan Hasil Koordinasi Penilaian Barang Milik Daerah	1 Laporan	1.000.000.000	Penilaian Barang Milik Daerah		Jumlah Laporan Hasil Penilaian Barang Milik Daerah dan Hasil Koordinasi Penilaian Barang Milik Daerah	1 Laporan	1.000.000.000	

PARAF KOORDINASI	
KEPALA BPKAD	
KEPALA BAPPELITBANGDA	
KABAG HUKUM	

	Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah	Bekasi	rangka Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah			Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah		rangka Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah			
TOTAL BLPU DAN BLU					155.657.332.700	TOTAL BLPU DAN BLU					155.872.332.700
	<b>Penunjang Urusan Kewenangan Pengelolaan Keuangan Daerah</b>				<b>74.600.000.000</b>					<b>74.600.000.000</b>	
	Pengelolaan Dana Darurat dan Mendesak	Kota Bekasi	Jumlah Laporan Hasil Pengelolaan Dana Darurat dan Mendesak	1 Laporan	74.600.000.000					74.600.000.000	
TOTAL KESELURUHAN BELANJA BPKAD DAN BELANJA DANA DARURAT					230.257.332.700					230.872.332.700	

PARAF KOORDINASI	
KEPALA BPKAD	
KEPALA BAPPELITBANGDA	
KABAG HUKUM	

PARAF KOORDINASI	
KEPALA BPKAD	
KEPALA BAPPELITBANGDA	
KABAG HUKUM	

## 2.5 Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat

Program / Kegiatan yang terdapat pada Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kota Kota Bekasi Tahun 2025 tidak terdapat usulan dari para Pemangku Kepentingan, baik dari Kelompok Masyarakat , LSM, Asosiasi – Asosiasi, Perguruan Tinggi maupun Perangkat Daerah lain pada saat pelaksanaan Musrenbang Kota.

Tabel 2.5.1

Usulan Program dan Kegiatan dari Para Pemangku Kepentingan Tahun 2025  
BPKAD Kota Bekasi

No	Program/ Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Besaran/ Volume	Catatan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
-	-	-	-	-	-

PARAF KOORDINASI	
KEPALA BPKAD	
KEPALA BAPPELITBANGDA	
KABAG HUKUM	

### BAB III TUJUAN DAN SASARAN

#### 3.1. Telaahan Terhadap Kebijakan Nasional

Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kota Bekasi merupakan Lembaga Teknis Daerah yang bertugas melaksanakan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan daerah di bidang anggaran, perbendaharaan, akuntansi dan aset, sedangkan untuk tingkat Kementerian dan Lembaga Nasional BPKAD Kota Bekasi menginduk dan berkoordinasi kepada Kementerian Keuangan dan Renstra Kementerian Dalam Negeri.

##### 3.1.1. Telaahan Kementerian Keuangan

Sesuai dengan Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 87/PMK.01/2021 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 77/PMK.01/2020 tentang Rencana Strategis Kementerian Keuangan Tahun 2020-2024, Kementerian Keuangan menetapkan Visi yaitu Menjadi Pengelola Keuangan Negara untuk Mewujudkan Perekonomian Indonesia yang Produktif, Kompetitif, Inklusif, dan Berkeadilan untuk Mendukung Visi dan Misi Presiden dan Wakil Presiden: "Indonesia Maju yang Berdaulat, Mandiri dan Berkepribadian Berlandaskan Gotong Royong".

Kementerian Keuangan melaksanakan Misi Presiden dan Wakil Presiden nomor 2 (Struktur ekonomi yang produktif, mandiri, dan berdaya saing) dan nomor 3 (Pembangunan yang merata dan berkeadilan), dengan 5 upaya:

1. Menerapkan kebijakan fiskal yang responsif dan berkelanjutan.
2. Mencapai tingkat pendapatan negara yang tinggi melalui pelayanan prima serta pengawasan dan penegakan hukum yang efektif.
3. Memastikan belanja negara yang berkeadilan, efektif, efisien, dan produktif.
4. Mengelola neraca keuangan pusat yang inovatif dengan risiko minimum.
5. Mengembangkan proses bisnis inti berbasis digital dan pengelolaan Sumber Daya Manusia yang adaptif sesuai kemajuan teknologi. Dalam rangka mewujudkan visi dan misi Presiden, Kementerian Keuangan Tahun 2020-2024 menetapkan lima tujuan dan sepuluh sasaran strategis.

PARAF KOORDINASI	
KEPALA BPKAD	
KEPALA BAPPSELITBANGDA	
KABAG HUKUM	

### 3.1.2. Telahaan Kementerian Dalam Negeri

Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 67 Tahun 2020 tentang Rencana Strategis Kementerian Dalam Negeri Tahun 2020-2024, Visi Kementerian dalam Negeri Tahun 2020-2024 adalah “Kementerian Dalam Negeri yang Adaptif, Profesional, Proaktif, dan Inovatif (APPI) dalam memperkuat penyelenggaraan pemerintahan dalam negeri, untuk mewujudkan Visi dan Misi Presiden dan Wakil Presiden: Indonesia Maju yang Berdaulat, Mandiri, dan Berkepribadian berlandaskan Gotong Royong”. Dalam menjalankan Visi tersebut kementerian Dalam Negeri.

Misi Kementerian Dalam Negeri yang berkaitan dengan tugas dan fungsi BPKAD adalah misi "Meningkatkan sinergi penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan daerah dan desa, melalui efektivitas penyelenggaraan desentralisasi dan otonomi daerah, penyelarasan pembangunan nasional dan daerah, pengelolaan keuangan pemerintah daerah yang akuntabel dan berpihak kepada rakyat, peningkatan tata kelola pemerintah desa yang efektif dan efisien, pendayagunaan administrasi kependudukan, serta penguatan administrasi kewilayahan dan penyelenggaraan layanan ketentraman dan ketertiban umum serta perlindungan masyarakat (Trantibumlinmas) dengan tujuan nomor dua yang ingin dicapai Kementerian Dalam Negeri dalam periode waktu 2020- 2024 adalah Peningkatan kapasitas dan sinergi pembangunan pusat dan daerah, serta pelayanan publik yang berkualitas dan penguatan inovasi (T2) dan untuk mewujudkan tujuan pada T2, ditetapkan sasaran strategis meliputi: Meningkatnya kapasitas dan kualitas SDM aparatur pemerintahan dalam negeri (SS5), Meningkatnya harmonisasi kualitas produk hukum pusat dan daerah (SS6), Meningkatnya tata kelola pemerintahan dalam negeri yang adaptif, profesional, proaktif, dan inovatif (SS7), Terjaminnya hak-hak keperdataan setiap warga negara dalam aspek kependudukan dan tersedianya data kependudukan untuk semua keperluan (SS8), Meningkatnya tata kelola penyelenggaraan kewilayahan (SS9)

## 3.2. Tujuan dan Sasaran Renja 2025

### 3.2.1. Tujuan

PARAF KOORDINASI	
KEPALA BPKAD	
KEPALA BAPPELITBANGDA	
KABAG HUKUM	

Berdasarkan Permendagri No 86 Tahun 2017, Tujuan diartikan sebagai suatu kondisi yang akan dicapai atau dihasilkan dalam jangka waktu 5 (lima) tahunan. Perumusan Tujuan Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Kota Bekasi sesuai dengan Visi Kota Bekasi Yaitu “Kota Bekasi Cerdas, Kreatif, Maju Sejahtera dan Ihsan”.

Selain pencapaian visi, Tujuan BPKAD Kota Bekasi dirumuskan untuk mendukung pencapaian misi telah ditetapkan adalah sebagai berikut :

Misi Pertama RPD: Meningkatkan Kapasitas Tata Kelola Kota Bekasi Pemerintahan yang baik.

- Tujuan Renstra :
- Mewujudkan Tata Kelola Keuangan dan Aset Daerah yang Profesional dan Akuntabel
  - Meningkatkan Kualitas Manajemen dan Kinerja Organisasi
- Indikator :
- Opini BPK terhadap Laporan Keuangan Daerah
  - Nilai LHE AKIP BPKAD

### 3.2.2. SASARAN

Sasaran adalah hasil yang akan dicapai secara nyata oleh Instansi Pemerintahan dalam rumusan yang lebih spesifik, terukur, dalam kurun waktu tertentu/tahunan secara berkesinambungan sejalan dengan tujuan yang ditetapkan. Berdasarkan Perumusan Tujuan Renstra BPKAD yang mengacu pada RPD Kota Bekasi Tahun 2024-2026 maka dapat dirumuskan 2 (dua) sasaran Renstra BPKAD, yaitu :

Sasaran Pertama RPD : a. Tercapainya Kinerja terbaik dalam  
Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah  
Setiap Tahun

b. Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Organisasi

Indikator :

a. Nilai Kinerja Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah

b. Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) BPKAD

PARAF KOORDINASI	
KEPALA BPKAD	
KEPALA BAPPEDITBANGDA	
KABAG HUKUM	

Tabel 3.1.1  
Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah  
Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah

NO	TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR TUJUAN/ SASARAN	TARGET KINERJA TUJUAN/ SASARAN PADA TAHUN KE-
				2025
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1.	Meningkatkan Kualitas Manajemen dan Kinerja Organisasi	-	Nilai LHE AKIP BPKAD	A (84,20)
		Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Organisasi	Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) BPKAD	A (84,20)
2.	Mewujudkan Tata Kelola Keuangan Dan Aset Daerah Yang Profesional Dan Akuntabel		Opini BPK terhadap Laporan Keuangan Daerah	WTP
		Tercapainya Kinerja Terbaik dalam Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Setiap Tahun	Nilai Kinerja Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah	WTP

Sumber data : Renstra BPKAD Tahun 2024-2026.

Sesuai dengan Tupoksi Badan Pengelolaan Keuangan Dan Aset Daerah berkedudukan sebagai unsur pembantu Wali Kota dalam pelaksanaan penunjang urusan Pemerintahan bidang keuangan, maka Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kota Bekasi berupaya untuk memaksimalkan pengelolaan keuangan yang efektif, transparan dan akuntabel.

PARAF KOORDINASI	
KEPALA BPKAD	
KEPALA BAPPELITBANGDA	
KABAG HUKUM	

### 3.3. Program dan Kegiatan

Program adalah penjabaran kebijakan Perangkat Daerah dalam bentuk upaya yang berisi satu atau lebih kegiatan dengan menggunakan sumber daya yang disediakan untuk mencapai hasil yang terukur sesuai dengan tugas dan fungsi. Kegiatan Perangkat Daerah adalah serangkaian aktivitas pembangunan yang dilaksanakan oleh Perangkat Daerah untuk menghasilkan keluaran (output) dalam rangka mencapai hasil (outcome) suatu program.

Rumusan kebijakan yang tepat akan melahirkan program-program yang mampu menjawab berbagai permasalahan yang akan dihadapi oleh BPKAD Kota Bekasi . Setiap program memiliki fungsi masing-masing. Berdasarkan tujuan, sasaran, strategi dan kebijakan ditentukan program dan kegiatan serta indikator kinerja masing-masing program, kegiatan, dan sub kegiatan. Program yang digunakan pada Renja BPKAD Kota Bekasi sebanyak tiga program, yaitu:

1. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Kabupaten/ Kota;
2. Program Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah;
3. Program Pengelolaan Barang Milik Daerah.

Dari 3 (tiga) program diatas kemudian dijabarkan menjadi 12 (dua belas) kegiatan dan 56 (lima puluh enam) sub kegiatan dengan total pagu anggaran sebesar Rp. 230.257.332.700 (dua ratus tiga puluh miliar dua ratus lima puluh tujuh juta tiga ratus tiga puluh dua ribu tujuh ratus rupiah) yang menunjang indikator kinerja utama. Rincian lebih lanjut mengenai Program, Kegiatan, Sub kegiatan, Indikator Kinerja, Target dan Pendanaan Indikatif dapat dilihat pada Tabel berikut:

PARAF KOORDINASI	
KEPALA BPKAD	
KEPALA BAPPELITBANGDA	
KABAG HUKUM	

Program dan Kegiatan Tahun 2025

KODE	URUSAN/ BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN PROGRAM/ KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM/ KEGIATAN	Rencana Tahun 2025			Sumber Dana	Catatan Penting	Target Capaian Kinerja	Pagu Indikatif (Rp)
			LOKASI Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja	Pagu Indikatif (Rp)				
	UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN								
	KEUANGAN				170.357.802.549			170.357.802.549	
	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA				130.188.484.400			130.188.484.400	
	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Optimalisasi Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	Kota Bekasi	100%	170.000.000			100%	170.000.000
	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Kota Bekasi	2 Dokumen	150.000.000	Pendapatan Asli Daerah (PAD)		2 Dokumen	150.000.000

PARAF KOORDINASI	
KEPALA BPKAD	
KEPALA BAPPELITBANGDA	
KABAG HUKUM	

					Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Kota Bekasi	4 Laporan	20.000.000	SILPA		4 Laporan	20.000.000
					Administrasi Keuangan Perangkat Daerah			100%	125.004.084.400			100%	125.004.084.400
					Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	Kota Bekasi	2700 Orang/Bulan	124.984.084.400	Pendapatan Asli Daerah (PAD) dan Dana Alokasi Umum (DAU)		2700 Orang/Bulan	124.984.084.400
					Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Kota Bekasi	1 Laporan	20.000.000	SILPA		1 Laporan	20.000.000
					Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah				926.380.000				926.380.000
					Pengadaan Peralatan dan mesin lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	Kota Bekasi	15 Unit	926.380.000	[DANA KHUSUS] - Pendapatan Bagi Hasil Pajak		15 Unit	926.380.000
					Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Optimalisasi Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur			730.000,000				730.000,000
					Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Kota Bekasi	178 Stel	200.000.000	Pendapatan Asli Daerah (PAD)		178 Stel	200.000.000

PARAF KOORDINASI	
KEPALA BPKAD	
KEPALA BAPPELITBANGDA	
KABAG HUKUM	

					Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	Kota Bekasi	19 Orang	100,000,000	Pendapatan Asli Daerah (PAD)		19 Orang	100,000,000
					Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Peserta	Kota Bekasi	100 Orang	430.000.000	SILPA		100 Orang	430.000.000
					Administrasi Umum Perangkat Daerah	Optimalisasi Peningkatan sarana dan prasarana aparatur			2.343.620.000				2.343.620.000
					Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	Kota Bekasi	8 Paket	1.300.000.000	SILPA		8 Paket	1.300.000.000
					Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	Kota Bekasi	2 Paket	200.000.000	SILPA		2 Paket	200.000.000
					Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	Kota Bekasi	9 Dokumen	50,000,000	SILPA		9 Dokumen	50,000,000
					Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	Kota Bekasi	35 Laporan	75,000,000	SILPA		35 Laporan	75,000,000
					Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Kota Bekasi	200 Laporan	385,000,000	SILPA		200 Laporan	385,000,000

PARAF KOORDINASI	
KEPALA BPKAD	
KEPALA BAPPELITBANGDA	
KABAG HUKUM	

					Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Kota Bekasi	1200 Dokumen	333.620.000	Pendapatan Asli Daerah (PAD)		1200 Dokumen	333.620.000
					Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Optimalisasi Pelayanan Administrasi Perkantoran			44.400.000				44.400.000
					Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	Kota Bekasi	12 Laporan	44.400.000	Pendapatan Asli Daerah (PAD)		12 Laporan	44.400.000
					Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Optimalisasi Pelayanan Administrasi Perkantoran	Kota Bekasi		970.000.000				970.000.000
					Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas/ Kendaraan Dinas Jabatan yang di pelihara dan dibayarkan pajaknya	Kota Bekasi	21 Unit	500,000,000	SILPA		21 Unit	500,000,000
					Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah kendaraan Dinas Operasional/ Lapangan yang dipelihara dan dibayarkan pajak dan perizinannya	Kota Bekasi	69 Unit	250,000,000	SILPA		69 Unit	250,000,000
					Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang dipelihara/ direhabilitasi	Kota Bekasi	70 Unit	220.000.000	SILPA		70 Unit	220.000.000

PARAF KOORDINASI	
KEPALA BPKAD	
KEPALA BAPPELITBANGDA	
KABAG HUKUM	

					PROGRAM PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH				37.0256.918.149				37.0256.918.149
					Koordinasi dan Penyusunan Rencana Anggaran Daerah	Ketepatan Waktu Penetapan APBD	Kota Bekasi		1.947.792.000				1.947.792.000
					Koordinasi dan Penyusunan KUA dan PPAS	Jumlah Dokumen KUA dan PPAS yang Disusun	Kota Bekasi	2 Dokumen	125.000.000	Dana Alokasi Umum (DAU)		2 Dokumen	125.000.000
					Koordinasi dan Penyusunan Perubahan KUA dan Perubahan PPAS	Jumlah Dokumen Perubahan KUA dan Perubahan PPAS yang Disusun	Kota Bekasi	2 Dokumen	125.000.000	Pendapatan Asli Daerah (PAD)		2 Dokumen	125.000.000
					Koordinasi, Penyusunan dan Verifikasi RKA-SKPD	Jumlah RKA-SKPD yang Diverifikasi	Kota Bekasi	1 Dokumen	64.330.000	Pendapatan Asli Daerah (PAD)		1 Dokumen	64.330.000
					Koordinasi, Penyusunan dan Verifikasi Perubahan RKA-SKPD	Jumlah RKA perubahan yang diverifikasi	Kota Bekasi	1 Dokumen	64.330.000	Pendapatan Asli Daerah (PAD)		1 Dokumen	64.330.000
					Koordinasi, Penyusunan dan Verifikasi DPA-SKPD	Jumlah DPA-SKPD yang Diverifikasi	Kota Bekasi	1 Dokumen	55.400.000	Pendapatan Asli Daerah (PAD)		1 Dokumen	55.400.000
					Koordinasi, Penyusunan dan Verifikasi Perubahan DPA-SKPD	Jumlah Perubahan DPA-SKPD yang Diverifikasi	Kota Bekasi	1 Dokumen	62.900.000	Pendapatan Asli Daerah (PAD)		1 Dokumen	62.900.000
					Koordinasi dan Penyusunan Peraturan Daerah tentang APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran APBD	Jumlah Peraturan Daerah tentang APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran APBD	Kota Bekasi	4 Dokumen	175.000.000	Pendapatan Asli Daerah (PAD)		4 Dokumen	175.000.000
					Koordinasi dan Penyusunan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Perubahan APBD	Jumlah Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Perubahan APBD	Kota Bekasi	2 Peraturan	395.075.000	Dana Alokasi Umum (DAU)		2 Peraturan	395.075.000

PARAF KOORDINASI	
KEPALA BPKAD	
KEPALA BAPPELITBANGDA	
KABAG HUKUM	

					Koordinasi dan Penyusunan Regulasi serta Kebijakan Bidang Anggaran	Jumlah Dokumen Regulasi serta Kebijakan Bidang Anggaran	Kota Bekasi	1 Dokumen	120.000.000	Dana Alokasi Umum (DAU)		1 Dokumen	120.000.000
					Koordinasi Perencanaan Anggaran Belanja Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi Perencanaan Anggaran Belanja Daerah, Jumlah Peserta Sosialisasi	Kota Bekasi	1 Dokumen	172.175.000	Dana Alokasi Umum (DAU)		1 Dokumen	172.175.000
					Koordinasi Perencanaan Anggaran Pembiayaan	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi Perencanaan Anggaran Pembiayaan	Kota Bekasi	1 Laporan	223.804.000	Pendapatan Asli Daerah (PAD)		1 Laporan	223.804.000
					Pembinaan Penganggaran Daerah Pemerintah Kabupaten/Kota	Jumlah peserta Pembinaan Penganggaran Daerah Pemerintah Kabupaten/Kota Sumber	Kota Bekasi	77 Orang	464.778.000	Pendapatan Asli Daerah (PAD)		77 Orang	464.778.000
					Koordinasi dan Pengelolaan Perbendaharaan Daerah	Persentase Kesesuaian Pelaporan Penerbitan SP2D dengan SPD dan SPM yang Diterima			732.001.000				732.001.000
					Koordinasi dan Pengelolaan Kas Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Pengelolaan Kas Daerah	Kota Bekasi	1 Aplikasi	105.000.000	Pendapatan Asli Daerah (PAD)		1 Aplikasi	105.000.000

PARAF KOORDINASI	
KEPALA BPKAD	
KEPALA BAPPELITBANGDA	
KABAG HUKUM	

						Rekonsiliasi Data Penerimaan dan Pengeluaran Kas serta Pemungutan dan Pemotongan atas SP2D dengan Instansi Terkait	Jumlah Dokumen Hasil Rekonsiliasi Data Penerimaan dan Pengeluaran Kas serta Pemotongan atas SP2D dengan Instansi Terkait	Kota Bekasi	36 Dokumen	134.355.000	Pendapatan Asli Daerah (PAD)		36 Dokumen	134.355.000
						Koordinasi, Fasilitasi, Asistensi, Sinkronisasi, Supervisi, Monitoring dan Evaluasi Pengelolaan Dana Perimbangan dan Dana Transfer Lainnya	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Fasilitasi, Asistensi, Sinkronisasi, Supervisi, Monitoring, dan Evaluasi Pengelolaan Dana Perimbangan dan Dana Transfer Lainnya	Kota Bekasi	1 Dokumen	49.926.000	Pendapatan Asli Daerah (PAD)		1 Dokumen	49.926.000
						Penyusunan Petunjuk Teknis Administrasi Keuangan yang Berkaitan dengan Penerimaan dan Pengeluaran Kas serta Penatausahaan dan Pertanggungjawaban Sub Kegiatan	Jumlah Petunjuk Teknis Administrasi Keuangan yang Berkaitan dengan Penerimaan dan Pengeluaran Kas serta Penatausahaan dan Pertanggungjawaban Sub Kegiatan	Kota Bekasi	1 Dokumen	122.720.000	Pendapatan Asli Daerah (PAD)		1 Dokumen	122.720.000
						Pembinaan Penatausahaan Keuangan Pemerintah Kabupaten/Kota	Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Penatausahaan Keuangan Pemerintah Kabupaten/Kota	Kota Bekasi	100 Orang	245.000.000	Pendapatan Asli Daerah (PAD)		100 Orang	245.000.000

PARAF KOORDINASI	
KEPALA BPKAD	
KEPALA BAPPELITBANGDA	
KABAG HUKUM	

					Koordinasi dan Penyusunan Laporan Realisasi Penerimaan dan Pengeluaran Kas Daerah, Laporan Aliran Kas dan Pelaksanaan Pemungutan/ Pemotongan dan Penyetoran Perhitungan Fihak Ketiga (PFK)	Jumlah Laporan Realisasi Penerimaan dan Pengeluaran Kas Daerah, Laporan Aliran Kas dan Pelaksanaan Pemungutan/ Pemotongan dan Penyetoran Perhitungan Fihak Ketiga (PFK)	Kota Bekasi	2 Laporan	75.000.000	Pendapatan Asli Daerah (PAD)		2 Laporan	75.000.000
					Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Daerah	Persentase Kesesuaian Pelaporan Keuangan dengan SAP dan Tepat Waktu		100%	2.076.306.000			100%	2.076.306.000
					Koordinasi Pelaksanaan Akuntansi Penerimaan dan Pengeluaran Kas Daerah	Jumlah Laporan Hasil Koordinasi Pelaksanaan Akuntansi Penerimaan dan Pengeluaran Kas Daerah	Kota Bekasi	4 Laporan	197.212.000	Pendapatan Asli Daerah (PAD)		4 Laporan	197.212.000
					Rekonsiliasi dan Verifikasi Aset, Kewajiban, Ekuitas, Pendapatan, Belanja, Pembiayaan, Pendapatan-LO dan Beban	Jumlah Dokumen Hasil Rekonsiliasi dan Verifikasi Aset, Kewajiban, Ekuitas, Pendapatan, Belanja, Pembiayaan, Pendapatan-LO, dan Beban	Kota Bekasi	4 Dokumen	70.758.000	Pendapatan Asli Daerah (PAD)		4 Dokumen	70.758.000
					Koordinasi Penyusunan Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Bulanan, Triwulanan dan Semesteran	Jumlah Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Bulanan, Triwulanan dan Semesteran	Kota Bekasi	3 Laporan	200.000.000	Pendapatan Asli Daerah (PAD)		3 Laporan	200.000.000
					Konsolidasi Laporan Keuangan SKPD, BLUD dan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah	Jumlah Laporan Keuangan SKPD, BLUD dan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah yang Terkonsolidasi	Kota Bekasi	2 Laporan	175.000.000	Pendapatan Asli Daerah (PAD)		2 Laporan	175.000.000

PARAF KOORDINASI	
KEPALA BPKAD	
KEPALA BAPPELITBANGDA	
KABAG HUKUM	

						Koordinasi dan Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Provinsi dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten/Kota	Jumlah Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten/Kota dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten/Kota	Kota Bekasi	2 Dokumen	175.000.000	Pendapatan Asli Daerah (PAD)		2 Dokumen	175.000.000
						Penyusunan Kebijakan dan Panduan Teknis Operasional Penyelenggaraan Akuntansi Pemerintah Daerah	Jumlah Kebijakan dan Panduan Teknis Operasional Penyelenggaraan Akuntansi Pemerintah Daerah	Kota Bekasi	3 Dokumen	150.000.000	Pendapatan Asli Daerah (PAD)		3 Dokumen	150.000.000
						Penyusunan Sistem dan Prosedur Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Pemerintah Daerah	Jumlah Sistem dan Prosedur Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Pemerintah Daerah	Kota Bekasi	5 Dokumen	508.336.000	Pendapatan Asli Daerah (PAD)		5 Dokumen	508.336.000
						Pembinaan Akuntansi, Pelaporan dan Pertanggungjawaban Pemerintah Kabupaten/Kota	Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Akuntansi, Pelaporan dan Pertanggungjawaban Pemerintah Kabupaten/Kota	Kota Bekasi	44 Orang	500.000.000	Pendapatan Asli Daerah (PAD)		44 Orang	500.000.000
						Pembinaan Pengelolaan Keuangan BLUD Kabupaten/Kota	Jumlah BLUD Kabupaten/Kota yang Dibina	Kota Bekasi	53 Lembaga	100.000.000	Pendapatan Asli Daerah (PAD)		53 Lembaga	100.000.000

PARAF KOORDINASI	
KEPALA BPKAD	
KEPALA BAPPELITBANGDA	
KABAG HUKUM	



						Penilaian Barang Milik Daerah	Jumlah Laporan Hasil Penilaian Barang Milik Daerah dan Hasil Koordinasi Penilaian Barang Milik Daerah	Kota Bekasi	1 Laporan	942.400.000	Pendapatan Asli Daerah (PAD)		1 Laporan	942.400.000
						Pengawasan dan Pengendalian Pengelolaan Barang Milik Daerah	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan dan Pengendalian Pengelolaan Barang Milik Daerah	Kota Bekasi	1 Laporan	50.000.000	Pendapatan Asli Daerah (PAD)		1 Laporan	50.000.000
						TOTAL BLPD DAN BLU				138.086.983.400				138.086.983.400
						Penunjang Urusan Kewenangan Pengelolaan Keuangan Daerah				32.270.819.149				32.270.819.149
						Pengelolaan Dana Darurat dan Mendesak	Jumlah Laporan Hasil Pengelolaan Dana Darurat dan Mendesak	Kota Bekasi	1 Laporan	32.270.819.149	Pendapatan Asli Daerah (PAD)		1 Laporan	32.270.819.149
						TOTAL KESELURUHAN BELANJA BPKAD DAN BELANJA DANA DARURAT				170.357.802.549				170.357.802.549

PARAF KOORDINASI	
KEPALA BPKAD	
KEPALA BAPPELITBANGDA	
KABAG HUKUM	

BAB IV  
RENCANA KERJA DAN PENDANAAN BPKAD

4.1 Program dan Kegiatan

4.1.1. Program

Sesuai Pasal 7 ayat (1) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah kedua kalinya dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011, SKPKD selaku PPKD (dalam hal ini BPKAD) mempunyai tugas antara lain menyusun Rancangan APBD/ Rancangan Perubahan APBD dan Rancangan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD. Mendasari ketentuan tersebut, BPKAD dalam menyusun program kegiatannya bersifat reguler, mengkoordinir, memfasilitasi dan mendukung SKPD di lingkungan Pemerintah Kota Bekasi, dalam hal pengelolaan keuangan dan aset daerah.

Program adalah bentuk instrumen kebijakan yang berisi satu atau lebih kegiatan yang dilaksanakan oleh SKPD atau masyarakat, yang dikoordinasikan oleh pemerintah daerah untuk mencapai sasaran dan tujuan pembangunan daerah. Program kerja BPKAD Kota Bekasi sesuai dengan Rencana Program Jangka Menengah Daerah Kota Bekasi Periode 20183 - 2023 sebagaimana diuraikan pada dokumen Renstra SKPD setelah disesuaikan dengan Organisasi Perangkat Daerah baru sebagaimana dalam Peraturan Wali kota Bekasi Nomor 3 Tahun 2019 tentang Penetapan Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun 2018 – 2023 Dilingkungan Pemerintah Kota Bekasi meliputi :

1. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Kabupaten/Kota;
2. Program Pengelolaan Keuangan Daerah;
3. Program Pengelolaan Barang Milik Daerah.

4.1.2. Kegiatan

Kegiatan adalah bagian dari program yang dilaksanakan oleh SKPD sebagai bagian dari pencapaian sasaran terukur pada suatu

PARAF KOORDINASI	
KEPALA BPKAD	
KEPALA BAPPELITBANGDA	
KABAG HUKUM	

program untuk menghasilkan keluaran (Output). Secara keseluruhan alokasi anggaran untuk program kegiatan BPKAD Kota Bekasi pada Tahun Anggaran 2025 diusulkan sebesar Rp. 170.357.802.549.

Faktor - faktor yang menjadi bahan pertimbangan terhadap rumusan Program dan Kegiatan untuk mendukung pencapaian Visi dan Misi Kepala Daerah Terpilih, dapat dirumuskan sebagai berikut ;

- **Transparansi dan Akuntabilitas Anggaran Daerah**  
Sebagai persyaratan utama untuk mewujudkan pemerintah yang baik, bersih dan bertanggung jawab. Sebagai instrumen evaluasi pencapaian kinerja dan tanggung jawab pemerintah daerah dalam mensejahterakan rakyat, maka APBD harus dapat menyajikan informasi yang jelas tentang tujuan, sasaran dan manfaat yang diperoleh masyarakat dari suatu kegiatan atau yang dianggarkan.
- **Disiplin Anggaran**  
Adanya program yang harus disusun dengan berorientasi pada kebutuhan masyarakat, tanpa meninggalkan keseimbangan antara pembiayaan penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan dan pelayanan masyarakat. Oleh karena itu, penyusunan dilakukan berlandaskan azas efisiensi, tepat guna, tepat waktu pada pelaksanaan dan penggunaannya dapat dipertanggungjawabkan.
- **Keadilan Anggaran**  
Pendapatan daerah pada hakekatnya diperoleh melalui mekanisme pajak dan retribusi atau beban lainnya yang ditanggung oleh segenap lapisan masyarakat. Untuk itu pemerintah wajib mengalokasikan penggunaannya secara adil dan merata berdasarkan pertimbangan yang obyektif agar dapat dinikmati seluruh kelompok masyarakat, tanpa adanya diskriminasi dalam pemberian pelayanan.
- **Efisiensi dan Efektivitas Anggaran**  
Dana yang tersedia harus dimanfaatkan dengan sebaik mungkin untuk dapat menghasilkan peningkatan pelayanan dan kesejahteraan secara optimal, guna kepentingan bagi masyarakat. Perencanaan perlu ditetapkan secara jelas dan terarah, baik itu tujuan, sasaran dan hasil serta pemanfaatan yang diperoleh masyarakat dari sesuatu kegiatan yang diprogramkan.

Rekapitulasi Program dan Kegiatan pada BPKAD antara lain;

PARAF KOORDINASI	
KEPALA BPKAD	
KEPALA BAPPELITBANGDA	
KABAG HUKUM	

- BPKAD Memiliki 3 Program dan 12 Kegiatan dengan 54 Sub Kegiatan yang direncanakan di Tahun 2025.

Berdasarkan Kepmendagri Nomor 050 - 5889 Tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi, Validasi, dan Inventarisasi Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan Daerah, untuk Sub Kegiatan Pengelolaan Dana Darurat dan Mendesak masuk dalam nomenklatur BPKAD.

PARAF KOORDINASI	
KEPALA BPKAD	
KEPALA BAPPELITBANGDA	
KABAG HUKUM	

Tabel 4.2  
Rencana Kerja dan Pendanaan Indikatif Program dan Kegiatan  
Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kota Bekasi

KODE	URUSAN/ BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN PROGRAM/ KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM/ KEGIATAN	Rencana Tahun 2025			Sumber Dana	Catatan Penting
			LOKASI Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja	Pagu Indikatif (Rp)		
	UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN				170.357.802.549		
	KEUANGAN				170.357.802.549		
	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA				130.188.484.400		
	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Optimalisasi Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan		100%	170.000.000		
	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Kota Bekasi	2 Dokumen	150.000.000		
	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Kota Bekasi	4 Laporan	20.000.000		
	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase Layanan Keuangan Perangkat Daerah		100%	125.004.084.400		
	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	Kota Bekasi	4704 Orang /bulan	124.984.084.400		
	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Kota Bekasi	1 Laporan	20.000.000		
	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase Pengadaan Barang Milik Daerah yang diadakan		100%	926.380.000		
	Pengadaan Peralatan dan mesin lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	Kota Bekasi	63 Unit	926.380.000		
	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase Layanan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah		100%	730.000.000		
	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Kota Bekasi	167 Paket	200.000.000		

PARAF KOORDINASI	
KEPALA BPKAD	
KEPALA BAPPELITBANGDA	
KABAG HUKUM	

					Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	Kota Bekasi	19 Orang	100,000,000			
					Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Kota Bekasi	172 Orang	430.000.000			
					Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase Layanan Administrasi Umum Perangkat Daerah		100%	2.343.620.000			
					Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	Kota Bekasi	8 Paket	1.300.000.000			
					Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	Kota Bekasi	2 Paket	200.000.000			
					Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	Kota Bekasi	10 Dokumen	50,000,000			
					Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	Kota Bekasi	35 Laporan	75,000,000			
					Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Kota Bekasi	200 Laporan	385,000,000			
					Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Kota Bekasi	1200 Dokumen	333.620.000			
					Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Optimalisasi Pelayanan Administrasi Perkantoran		100%	44.400.000			
					Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	Kota Bekasi	12 Laporan	44.400.000			
					Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Barang Milik Daerah yang Terpelihara	Kota Bekasi	100%	970.000.000			
					Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas/ Kendaraan Dinas Jabatan yang di pelihara dan dibayarkan pajaknya	Kota Bekasi	20 Unit	500,000,000			
					Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah kendaraan Dinas Operasional/ Lapangan yang dipelihara dan dibayarkan pajak dan perizinannya	Kota Bekasi	71 Unit	250,000,000			
					Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang dipelihara/ direhabilitasi	Kota Bekasi	70 Unit	220.000.000			
					PROGRAM PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH				37.026.918.149			

PARAF KOORDINASI	
KEPALA BPKAD	
KEPALA BAPPELITBANGDA	
KABAG HUKUM	

					Koordinasi dan Penyusunan Rencana Anggaran Daerah	Ketepatan Waktu Penetapan APBD	Kota Bekasi	A Grade	1.947.792.000		
					Koordinasi dan Penyusunan KUA dan PPAS	Jumlah Dokumen KUA dan PPAS yang Disusun	Kota Bekasi	2 Dokumen	125.000.000		
					Koordinasi dan Penyusunan Perubahan KUA dan Perubahan PPAS	Jumlah Dokumen Perubahan KUA dan Perubahan PPAS yang Disusun	Kota Bekasi	2 Dokumen	125.000.000		
					Koordinasi, Penyusunan dan Verifikasi RKA-SKPD	Jumlah RKA-SKPD yang Diverifikasi	Kota Bekasi	1 Dokumen	64.330.000		
					Koordinasi, Penyusunan dan Verifikasi Perubahan RKA-SKPD	Jumlah RKA perubahan yang diverifikasi	Kota Bekasi	1 Dokumen	64.330.000		
					Koordinasi, Penyusunan dan Verifikasi DPA-SKPD	Jumlah DPA-SKPD yang Diverifikasi	Kota Bekasi	1 Dokumen	55.400.000		
					Koordinasi, Penyusunan dan Verifikasi Perubahan DPA-SKPD	Jumlah Perubahan DPA-SKPD yang Diverifikasi	Kota Bekasi	1 Dokumen	62.900.000		
					Koordinasi dan Penyusunan Peraturan Daerah tentang APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran APBD	Jumlah Peraturan Daerah tentang APBD dan Perkada tentang Penjabaran APBD	Kota Bekasi	4 Dokumen	175.000.000		
					Koordinasi dan Penyusunan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Perubahan APBD	Jumlah Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Perubahan APBD	Kota Bekasi	2 Peraturan	295.075.000		
					Koordinasi dan Penyusunan Regulasi serta Kebijakan Bidang Anggaran	Jumlah Dokumen Regulasi serta Kebijakan Bidang Anggaran	Kota Bekasi	1 Dokumen	120.000.000		
					Koordinasi Perencanaan Anggaran Belanja Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi Perencanaan Anggaran Belanja Daerah, Jumlah Peserta Sosialisasi	Kota Bekasi	3 Dokumen	172.175.000		
					Koordinasi Perencanaan Anggaran Pembiayaan	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi Perencanaan Anggaran Pembiayaan	Kota Bekasi	1 Dokumen	223.804.000		
					Pembinaan Penganggaran Daerah Pemerintah Kabupaten/Kota	Jumlah peserta Pembinaan Penganggaran Daerah Pemerintah Kabupaten/Kota Sumber	Kota Bekasi	220 Orang	464.778.000		
					Koordinasi dan Pengelolaan Perbendaharaan Daerah	Persentase Kesesuaian Pelaporan Penerbitan SP2D dengan SPD dan SPM yang Diterima			732.001.000		
					Koordinasi dan Pengelolaan Kas Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Pengelolaan Kas Daerah	Kota Bekasi	1 Dokumen	105.000.000		
					Rekonsiliasi Data Penerimaan dan Pengeluaran Kas serta Pemungutan dan Pemotongan atas SP2D dengan Instansi Terkait	Jumlah Dokumen Hasil Rekonsiliasi Data Penerimaan dan Pengeluaran Kas serta Pemungutan dan Pemotongan atas SP2D dengan Instansi Terkait	Kota Bekasi	3 Dokumen	134.355.000		

PARAF KOORDINASI	
KEPALA BPKAD	
KEPALA BAPPELITBANGDA	
KABAG HUKUM	

					Koordinasi, Fasilitasi, Asistensi, Sinkronisasi, Supervisi, Monitoring dan Evaluasi Pengelolaan Dana Perimbangan dan Dana Transfer Lainnya	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Fasilitasi, Asistensi, Sinkronisasi, Supervisi, Monitoring, dan Evaluasi Pengelolaan Dana Perimbangan dan Dana Transfer Lainnya	Kota Bekasi	1 Dokumen	49.926.000			
					Penyusunan Petunjuk Teknis Administrasi Keuangan yang Berkaitan dengan Penerimaan dan Pengeluaran Kas serta Penatausahaan dan Pertanggungjawaban Sub Kegiatan	Jumlah Petunjuk Teknis Administrasi Keuangan yang Berkaitan dengan Penerimaan dan Pengeluaran Kas serta Penatausahaan dan Pertanggungjawaban Sub Kegiatan	Kota Bekasi	1 Dokumen	122.720.000			
					Koordinasi dan Penyusunan Laporan Realisasi Penerimaan dan Pengeluaran Kas Daerah, Laporan Aliran Kas dan Pelaksanaan Pemungutan/ Pemotongan dan Penyetoran Perhitungan Fihak Ketiga (PFK)	Jumlah Laporan Realisasi Penerimaan dan Pengeluaran Kas Daerah, Laporan Aliran Kas dan Pelaksanaan Pemungutan/ Pemotongan dan Penyetoran Perhitungan Fihak Ketiga (PFK)	Kota Bekasi	2 Laporan	75.000.000			
					Pembinaan Penatausahaan Keuangan Pemerintah Kabupaten/Kota	Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Penatausahaan Keuangan Pemerintah Kabupaten/Kota	Kota Bekasi	500 Orang	245.000.000			
					Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Daerah	Persentase Kesesuaian Pelaporan Keuangan dengan SAP dan Tepat Waktu			2.076.306.000			
					Koordinasi Pelaksanaan Akuntansi Penerimaan dan Pengeluaran Kas Daerah	Jumlah Laporan Hasil Koordinasi Pelaksanaan Akuntansi Penerimaan dan Pengeluaran Kas Daerah	Kota Bekasi	4 Laporan	197.212.000			
					Rekonsiliasi dan Verifikasi Aset, Kewajiban, Ekuitas, Pendapatan, Belanja, Pembiayaan, Pendapatan-LO dan Beban	Jumlah Dokumen Hasil Rekonsiliasi dan Verifikasi Aset, Kewajiban, Ekuitas, Pendapatan, Belanja, Pembiayaan, Pendapatan-LO, dan Beban	Kota Bekasi	4 Dokumen	70.758.000			
					Koordinasi Penyusunan Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Bulanan, Triwulanan dan Semesteran	Jumlah Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Bulanan, Triwulanan dan Semesteran	Kota Bekasi	3 Laporan	200.000.000			
					Konsolidasi Laporan Keuangan SKPD, BLUD dan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah	Jumlah Laporan Keuangan SKPD, BLUD dan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah yang Terkonsolidasi	Kota Bekasi	2 Laporan	175.000.000			

PARAF KOORDINASI	
KEPALA BPKAD	
KEPALA BAPPELITBANGDA	
KABAG HUKUM	



						Penilaian Barang Milik Daerah	Jumlah Laporan Hasil Penilaian Barang Milik Daerah dan Hasil Koordinasi Penilaian Barang Milik Daerah	Kota Bekasi	1 Laporan	942.400.000		
						Pengawasan dan Pengendalian Pengelolaan Barang Milik Daerah	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan dan Pengendalian Pengelolaan Barang Milik Daerah	Kota Bekasi	1 Laporan	50.000.000		
<b>TOTAL BLPU DAN BLU</b>										<b>138.086.983.400</b>		
						Penunjang Urusan Kewenangan Pengelolaan Keuangan Daerah				32.270.819.149		
						Pengelolaan Dana Darurat dan Mendesak	Jumlah Laporan Hasil Pengelolaan Dana Darurat dan Mendesak	Kota Bekasi	1 Laporan	32.270.819.149		
<b>TOTAL KESELURUHAN BELANJA BPKAD DAN BELANJA DANA DARURAT</b>										<b>170.357.802.549</b>		

PARAF KOORDINASI	
KEPALA BPKAD	
KEPALA BAPPELITBANGDA	
KABAG HUKUM	

## BAB V

### PENUTUP

Rencana Kerja Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Tahun 2025 dalam rangka menunjang visi dan misi Kepala Daerah Kota Bekasi dengan mengacu RKPD Kota Bekasi Tahun 2025, Rencana Kerja disusun untuk menggambarkan program dan kegiatan prioritas tahun 2025 merupakan upaya pencapaian tujuan dan sasaran jangka pendek dalam menjalankan urusan wajib pelayanan dasar Ketentraman dan Ketertiban Umum serta Perlindungan Masyarakat.

Dalam upaya lebih mengoptimalkan kinerja Badan Pengelolaan Keuangan Aset Daerah Kota Bekasi dilakukan upaya antara lain :

1. Peningkatan kapabilitas aparatur baik ASN maupun non ASN melalui kegiatan pembinaan pegawai yang dilaksanakan secara rutin untuk meningkatkan motivasi dan semangat kerja, baik forum formal maupun non formal;
2. Melaksanakan pembinaan dan pendampingan serta kegiatan bimbingan teknik dalam rangka meningkatkan kualitas pengelolaan keuangan dan aset daerah yang sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintah (SAP);
3. Monitoring dan evaluasi dilaksanakan setiap satu bulan sekali dalam menangani berbagai permasalahan dan hambatan yang muncul pada saat pelaksanaan program / kegiatan sebagai alat pencapaian target indikator kinerja yang diinginkan;
4. Memberikan funish and reward terhadap pencapaian program / kegiatan setiap tahunnya;
5. Memberikan sarana dan prasarana yang memadai dalam mendukung pekerjaan

PARAF KOORDINASI	
KEPALA BPKAD	
KEPALA BAPPELITBANGDA	
KABAG HUKUM	

Demikian Rencana Kerja Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Tahun 2025, semoga dapat menjadi dokumen kerja OPD yang bermanfaat dalam proses pencapaian tujuan khususnya bagi Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah dan Pemerintah Kota Bekasi pada umumnya.

Bekasi ,

KEPALA BADAN PENGELOLAAN  
KEUANGAN DAN ASET DAERAH  
KOTA BEKASI



Drs. SUDARSONO, M.Si  
Pembina Utama Muda / IV c  
NIP. 19650722 198603 1 011

PARAF KOORDINASI	
KEPALA BPKAD	
KEPALA BAPPELITBANGDA	
KABAG HUKUM	